

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD)
DESA MARGA AYU KECAMATAN MARGASARI
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

**ABU MASIHAD
1605026121**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

H. Johan Arifin S.Ag.MM.

Perum BPI Blok D No.1 RT.02 RW.10 Purwoyoso
Ngaliyan, Semarang

Nuruddin, SE.MM

Serangan, Desa Sukodono RT.01 RW.04, Kec. Bonang, Kab. Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdr. Abu Masihad

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Abu Masihad
NIM : 1605026121
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

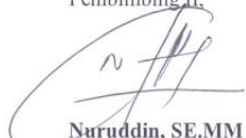
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I,


H. Johan Arifin S.Ag.MM.
NIP: 19710908 200212 1 001

Semarang, 11 Juli 2018
Pembimbing II,


Nuruddin, SE.MM
NIP: 19900523 201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291, 762491 Semarang

PENGESAHAN

Nama : Abu Masihad
NIM : 1605026121
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA MARGA
AYU KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2017**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus Pada tanggal:


24 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) dalam Ilmu Ekonomi Islam tahun akademik 2017/2018.


Semarang, 24 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang,


Rahman El Junusi, SE.,MM.
NIP: 19691118 200003 1 001

Penguji I,


Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP: 19700321 199603 1 003

Pembimbing I,



H. Johan Arifin S.Ag.,MM.
NIP: 19710908 200212 1 001

Sekretaris Sidang,

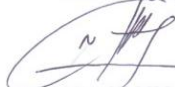

H. Johan Arifin, S.Ag.,MM.
NIP: 19710908 200212 1 001

Penguji II,




Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP: 19690830 199403 2 003

Pembimbing II,


Nuruddin, SE.MM
NIP: 19900523 201503 1 004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Qs. An-Nisa : 58).

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan banyak kenikmatan dan karunia. Dengan penuh kerendahan hati, saya persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Keluargaku tercinta, mbah kakung, mbah Putri, bapak Zainuri, umi Saadatun, dan adik-adikku Nurainun Dwi Fitriani, Nur laila Anajmi, Yusuf Firdaos yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang sangat membantu dan sangat berarti di dalam hidup penulis
2. Almamaterku, UIN Walisongo Semarang, khususnya keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Pemerintah Desa Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal serta unsur-unsur desa yang telah membantu penulis.
4. Keluarga besar UKM Olahraga WSC UIN Walisongo Semarang khususnya Divisi Bola Voly yang tak hentinya mendoakan dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis.
5. Terspesial untuk Rozlen Faiqotus Silvia yang tidak hentinya mendukung dan memberikan semangat untuk penulis.
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa transfer Ekonomi Islam yang telah bersama-sama menghabiskan waktu selama dua tahun untuk menyelesaikan program transfer.
7. Keluarga Venty Kost, Amiril, Syafik, Fatih, Faris, dan Faris Zaini Mubarak S.Sos.I, yang telah banyak membantu penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang.

Semua pihak yang telah mendukung dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah selalu memberikan karunia kepada kita. Amiin

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juli 2018

Deklarator,



ABU MASIHAD
NIM: 1605026121

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

أَيّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al*-... misalnya الصناعة = *al-shina* 'ah. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah

Setiap *ta' marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Kehadiran undang-undang tentang desa yaitu UU No.6 Tahun 2014 memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus sebagai kekuatan desa untuk membangun infrastruktur serta memberdayakan masyarakat desa. Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, desa mendapatkan dana transfer dari daerah berupa Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penelitian ini dilaksanakan di desa Marga Ayu, kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD. Hasil deskripsi didapat melalui analisa Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan membandingkan realisasi di lapangan.

Pengelolaan ADD dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan yang masih belum sesuai dengan target waktu.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA MARGA AYU KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan dan dorongan serta perhatian dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. H. Johan Arifin, S.Ag.,MM., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Nuruddin, SE.,MM., selaku dosen pembimbing II yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini

5. Seluruh dosen pengajar, staf administrasi dan keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
6. Pemerintah Desa Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal yang telah bersedia menjadi objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdoa dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Semarang, 11 Juli 2018
Penulis

ABU MASIHAD
NIM. 1605026121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Metodologi Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	22

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DESA, PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ISLAM

A. Desa	24
B. Pengelolaan Keuangan Desa.....	35
C. Alokasi Dana Desa.....	49
D. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Syariah	52

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA MARGA AYU

A. Sejarah Desa Marga Ayu	66
B. Kondisi Geografis Desa Marga Ayu	67
C. Visi, Misi dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Marga Ayu	69
D. Potensi Sumber Daya Manusia Desa Marga Ayu	71
E. Mata Pencarian dan Angkatan Kerja Penduduk Desa Marga Ayu	73
F. Arah Kebijakan Keuangan Desa	75
G. Prioritas Program dan Kegiatan	78
H. Badan Permusyawaratan Desa Marga Ayu.....	80
I. Kelembagaan Masyarakat Desa Marga Ayu.....	82

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA MARGA AYU KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017

A. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Tahun 2017	86
--	----

BAB V : KESIMPULAN

A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
C. Penutup	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.¹ Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya.

¹ H.A Rosid, *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah*, dalam Yaya M. Abdul Aziz dan Ade priangani (eds.), *Titik Balik Demokrasi dan Otonomi Pikiran-Pikiran Krisis di Saat Krisis*, Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002, h.266

Meskipun kebijakan otonomi daerah dititik beratkan pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung harus bersentuhan dengan level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan

oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disini lain juga perlu diringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel².

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut UNDP (1997), pemerintahan yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, konsensus, adil, efisiensi dan efektivitas serta memiliki visi strategis.³ *Good governance* sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Subroto adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi

² Abdul Halim, M.Syam Kusufi, *Teori ,Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat, 2016, h.481

³ Muhadam labolo, *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015, h.82

dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas.⁴

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.⁵ Besarnya ADD minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pengelolaannya kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kebijakan penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

⁴ Agus Subroto, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyokabupaten Temanggung Tahun 2008), Tesis Magister Sains Akuntansi, Semarang, UNDIP, 2009, h.23

⁵

<http://www.bkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabimkonkeude sa.pdf>, diakses tanggal 10 April 2018.

Pengelolaan ADD secara umum tidak dapat dipisahkan dengan APBDes. Karena ADD merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang pengelolaan ADD termuat dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara umum tahap perencanaan dilaksanakan pada tahun sebelumnya, yakni akhir tahun 2016. Sedangkan tahap pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Pengalokasian ADD dari pemerintah kabupaten Tegal kepada 281 (dua ratus delapan puluh satu) desa yang ada didalam wilayahnya pada tahun 2017 ditetapkan dalam peraturan bupati Tegal No 2 Tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian dan pelaksanaan serta penetapan alokasi dana desa kabupaten tegal tahun 2017. Besarnya dana ADD kabupaten Tegal tahun 2017 adalah sebesar Rp. 120.521.520.000,- (seratus dua puluh milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).⁶ Pengelolaan keuangan desa di kabupaten Tegal tahun 2017 telah menerapkan sistim keuangan desa secara online dengan menggunakan aplikasi yang bernama sistim keuangan desa (siskeudes). Dengan aplikasi

⁶ Perbup Tegal no 2 tahun 2017

siskeudes tugas bendahara desa dapat terbantu. Segala tahapan proses pengelolaan keuangan desa akan diproses secara otomatis.

Desa Marga Ayu merupakan desa yang terletak di kecamatan Margasari yang termasuk dalam wilayah kabupaten Tegal. Desa Marga Ayu diresmikan berdasarkan keputusan bupati Tegal nomor:146.1/1174/2000 tertanggal 21 Desember 2000. Desa Marga Ayu pada tahun 2017 mendapatkan ADD sebesar Rp. 425.232.631 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)⁷. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Marga Ayu ternyata masih memiliki kendala. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Marga Ayu adalah masih kurangnya kepedulian sebagian masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta masih terbatasnya kemampuan aparat desa dalam mengelola keuangan desa karena pengelolaan keuangan desa tahun 2017. Hal tersebut diungkapkan oleh sekretaris desa Marga Ayu dan disebutkan dalam RKPDesa tahun 2017.

Pengelolaan keuangan desa Marga Ayu dalam hal ini pengelolaan ADD diawali dengan perencanaan. Perencanaan diawali dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RKPDes merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes mempunyai jangka waktu enam tahun. RKPDes desa Marga Ayu

⁷ Copy dokumen APBDes Marga Ayu Tahun 2017

ditetapkan pada tanggal 11 November 2016. RKPDes dijadikan sebagai acuan pemerintah desa dalam menetapkan APBDes. Berdasarkan ketentuan, APBDes seharusnya ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Namun faktanya APBDes desa Marga Ayu baru ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2017.

Tahapan selanjutnya yakni tahap pelaksanaan dan tahap penatusahaan. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tahap penatusahaan dilakukan oleh bendahara desa. Pelaksanaan pencairan ADD pada tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Rincian Pencairan ADD desa Marga Ayu Tahun 2017

No	Uraian	Tanggal Masuk ADD	Jumlah
1	Pencairan Tahap 1 (Januari-Juni)	20 Juni 2017	Rp. 212.616.315.-
2	Pencairan Tahap 2 (Juli-September)	10 Oktober 2017	Rp. 106.308.158,-
3	Pencairan Tahap 3 (Oktober-November)	20 November 2017	Rp. 70.872.105,-
4	Pencairan Tahap 4 (Desember)	15 Desember 2017	Rp. 35.436.053,-
JUMLAH			Rp. 425.232.631,-

Sumber: Laporan Akhir Penggunaan ADD desa Marga Ayu tahun 2017

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pemerintah desa Marga Ayu mengalami keterlambatan pencairan dana. Karena pencairan dana tahap pertama baru terealisasi pada bulan Juni 2017. Sedangkan biaya operasional pemerintahan dan penghasilan perangkat desa merupakan pengeluaran rutin yang seharusnya dibayarkan setiap bulan. Tahapan berikutnya yakni tahap penatusahaan. Tahap penatusahaan dikerjakan oleh bendahara desa. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa. Penatusahaan dikerjakan oleh bendahara setelah pelaksanaan program kegiatan yang menggunakan dana ADD. Bendahara melakukan input data-data transaksi keuangan secara otomatis kedalam siskeudes. Pencairan dana tahap pertama terjadi pada bulan Juni, lantas bagaimana penatusahaan yang dilakukan setiap bulan oleh bendahara desa. Idealnya penatusahaan dilakukan setelah selesainya pelaksanaan program kegiatan.

Tahap selanjutnya adalah pelaporan. Setiap bulan bendahara melaporkan posisi keuangan kepada kepala desa. Kepala desa wajib melaporkan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati. Laporan tersebut berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan Juli dan laporan akhir tahun paling lambat dilaporkan satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan atau pada bulan Januari tahun berikutnya. Berdasarkan laporan realisasi penggunaan ADD desa Marga Ayu, tahun 2017 terdapat silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) sebesar Rp. 78.834.631,- (Tujuh puluh

delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).⁸ Dibandingkan dengan silpa tahun 2016 silpa tahun 2017 lebih kecil. Silpa tahun 2016 sendiri berjumlah sebesar Rp. 153.277.757,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan ADD tahun 2017.

Tahap yang terakhir dari proses pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban merupakan bukti atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola ADD dan bukti bahwa pemerintah desa telah menyelesaikan program-program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan ADD pada tahun berikutnya. Pertanggung jawaban ADD desa Marga Ayu disampaikan kepada Bupati Tegal pada tanggal 31 Desember 2017.

Peran perangkat desa harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya tentang pengelolaan keuangan desa, serta memiliki kemampuan dan integritas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Kemampuan dan integritas perangkat desa sangat dibutuhkan dalam

⁸ Dokumen Laporan Akhir Penggunaan ADD 2017 Desa Marga Ayu

hal ini karena resiko dari pengelolaan keuangan sangatlah besar. Seperti berita yang dimuat dalam detik news Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis sebanyak 110 kasus penyelewengan Dana Desa (DD) dan ADD sepanjang 2016 sampai dengan 10 Agustus 2017. Dari 110 kasus tersebut jumlah kerugian negara mencapai 30 (tiga puluh) miliar⁹. Data tersebut didapat ICW dari berbagai sumber media hingga aparat penegak hukum. Hal tersebut menandakan bahwa pengelolaan keuangan desa sangat rawan dan berisiko terjadinya korupsi.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Puteri Ainurrohma Romantis (2015), hasilnya prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan ADD di kecamatan panarukan. Kadek Sukrawati (2016), menyatakan bahwa perangkat desa sudah berperan dengan baik dan akuntabel dalam pengelolaan ADD di desa Pudaria Jaya. Masiyah Kholmi (2016) menyatakan bahwa perencanaan dan pengelolaan ADD di desa kedung batik sudah dikatakan akuntabel. Arista widiyanti (2017), menyatakan bahwa pengelolaan ADD di desa sumberejo sudah transparan dan akuntabel, tetapi di desa kandung tidak transparan dan tidak akuntabel.

⁹ Yulida Medistiara, "ICW sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa", <https://m.detik.com/news/berita/d-3596041>, diakses pada tanggal 24 Juli 2018.

Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman (2017) menyatakan bahwa pengelolaan ADD di kecamatan Regojampi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Tetapi dalam pengawasannya belum berjalan karena masih kurang transparan dengan masyarakat. Dari hasil beberapa penelitian yang telah disebutkan terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai acuan untuk pembanding yaitu penelitian Arista Widiyanti. Penelitian ini dilakukan pada objek yang berbeda yaitu pemerintah Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dengan menggunakan pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. Peneliti ingin menganalisa apakah pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini fokus pada pengelolaan ADD desa Marga Ayu tahun anggaran 2017. Pemilihan periode pada tahun 2017 dimaksudkan supaya dapat diperoleh informasi yang lebih *up to date*.

B. Rumusan Masalah

Keberhasilan pengelolaan ADD ditentukan berbagai faktor antara lain kemampuan aparat pemerintah desa sebagai administrator dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan desa dalam Alokasi Dana Desa di desa Marga Ayu?

C. Tujuan Dan Manfaat**1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

- a. Mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Marga Ayu.
- b. Menganalisis pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Marga Ayu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang pengelolaan keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Marga Ayu tahun 2017.
- b. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

- c. Bagi instansi yang bersangkutan sebagai masukan kepada pemerintah Desa Marga Ayu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa antara lain :

1. Puteri Ainurrohman Romantis (2015), meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
2. Kadek Sukrawati (2016), meneliti tentang Peran perangkat Desa Dalam Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi pada desa pudaria jaya kecamatan moramo). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah berperan dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, perangkat desa melakukan musyawarah untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Dalam pelaksanaan dana desa pengajuan pendanaan dana desa disertai dengan RAB dan bendahara desa melakukan pembayaran sesuai dengan RAB yang telah disetujui oleh sekretaris desa. Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan menggunakan pembukuan yang dimasukkan kedalam buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan dana desa mengenai dana yang digunakan dari tahap I, II, dan III. Dalam pertanggung jawaban perangkat desa mempertanggung jawabkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Masiyah Kholmi (2016), Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No.113 Tahun 2014 dan alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD.

4. Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman (2017), Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.
5. Arista widiyanti (2017), Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada desa sumberejo dan desa kandung di kecamatan winongan kabupaten pasuruan). Hasil penelitian berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di desa sumber rejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk desa kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan tidak transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang digunakan sebagai bahan acuan dan pembanding yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arista widiyanti (2017), Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada desa sumberejo dan desa kandung di kecamatan winongan kabupaten pasuruan). Sesuai dengan pemaparan diatas, persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneiliti tentang pengelolaan ADD. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus pada tahapan perencanaan pelaksanaan dan penatausahaan.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁰ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, h.43

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jane Richie mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Seperti dikatakan oleh Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang Desa Marga Ayu, dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Marga Ayu. Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau

¹¹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, h.6

pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data tersebut di peroleh dengan cara wawancara langsung dengan Pengelola keuangan desa Marga Ayu, seperti sekretaris desa, bendahara desa, Tim Pelaksana Kegiatan desa, dan diluar pengelola keuangan desa yaitu ketua BPD, tokoh masyarakat, ketua RW desa Marga Ayu.

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancari merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dan pengambilan foto. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.¹²

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, internet dari situs pemerintah dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam pengumpulan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹² *Ibid.*, h.157

Data sekunder penelitian ini juga diperoleh dari dokumen–dokumen Bagian Pemerintahan Desa Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.¹³

Wawancara dilakukan dengan Informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai partisipan untuk menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informan yang diwawancara adalah diantaranya sekretaris desa, bendahara desa, TPK desa, ketua BPD, ketua RW, dan tokoh masyarakat desa Marga Ayu.

¹³ Moleong, *Metodologi...*, h.186

b. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, dan atau karya monumental seseorang.¹⁴

Dokumen sangat berguna untuk penelitian jika peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai sesuatu peristiwa yang telah terjadi tetapi kesulitan untuk menemui dan mewawancarai secara langsung para pelaku. Maka dari itu dokumen sangat mendukung dalam penelitian kualitatif.¹⁵ Adapun jenis dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang menyangkut dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa Marga Ayu di tahun 2017.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku yang ditulis Rulam Ahmadi mengatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan material-material lain yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman dan dipresentasikan apa yang telah ditemukan kepada orang lain.

¹⁴ Sudaryono, *Metodologi...*, h.219

¹⁵ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar*, Jakarta : Indeks, 2012, h.61

Analisis meliputi mengerjakan data, mengorganisasi data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis data, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dilaporkan.¹⁶

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis data model Creswell adalah sebagai berikut¹⁷ :

- a. Mengumpulkan data
- b. Mempersiapkannya untuk analisis data
- c. Membaca data
- d. Membuat kode data
- e. Memberikan kode teks untuk deskripsi yang digunakan dalam laporan penelitian
- f. Memberikan kode teks untuk tema yang digunakan dalam laporan penelitian

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisa data-data tersebut. Analisis data yang digunakan dalam peneitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga penyajian informasinya dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang

¹⁶ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, h.230

¹⁷ *Ibid*, h.232

bertujuan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat aktual, sistematis dan akurat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling sistematis. Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang pembahasan umum topik yaitu tentang pengertian Desa, pengelolaan keuangan desa, pengertian Alokasi Dana Desa (ADD), dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan secara syariah.

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA MARGA AYU

Berisi tentang sejarah berdirinya desa Marga Ayu, Kondisi geografis, Visi dan Misi, struktur organisasi pemerintahan, potensi dan sumber daya, mata pencaharian dan angkatan kerja, arah kebijakan keuangan desa, program kerja Desa Marga Ayu,

Prioritas kegiatan, dan lembaga-lembaga desa Marga Ayu.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan permasalahan yaitu analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Marga Ayu Tahun 2017.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan dan sekaligus jawaban dari permasalahan yang dikaji. Bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran yang berguna bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA, PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ISLAM

A. Desa

1. Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Bintarto mendefinisikan desa dilihat dari aspek geografis yaitu desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.¹⁸ Istilah desa juga disebut secara beragam diberbagai wilayah di Indonesia, seperti : *gampong* (Aceh), *kampong* (Sunda), *nagari* (Padang), *wanus* (Sulawesi Utara), *huta* (Batak), *dusun* dan *marga* (Sumatera Selatan), *tiuh* atau *pekon* (Lampung), *lembang* (Toraja), *banua* dan *wanua* (Kalimantan). Berbagai nama lain selain desa menunjukkan

¹⁸ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, h.226

bahwa desa atau sebutan lain telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Definisi desa menurut UU No.6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰ Berdasarkan pengertian desa menurut UUNo 6 Tahun 2014 desa terdiri dari atas desa dan desa adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berada di desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumberdaya lokal, dan kehidupan sosial masyarakat desa. Dapat diambil kesimpulan desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

¹⁹ Yuliansayah, *Akuntansi Desa*, Jakarta : Salemba Empat, 2016, h.1

²⁰ UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kuntjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap disuatu daerah, sedangkan Bergel mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani. Landis menguraikan pengertian desa dalam tiga aspek :²¹

- a. Analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500 orang.
- b. Analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya.
- c. Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.

Menurut Jan Hoesada desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul yang menyangkut dengan pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penegakkan dan pengembangan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat. Peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

²¹ Nurman, *Strategi...*, h.226

Berdasarkan beberapa pengertian desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dibangun berdasarkan sejarah, adat istiadat, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

2. Karakteristik Desa

Sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa yang dapat dilihat dari berbagai aspek menurut Sapari Imam As'ari meliputi:²²

- a. Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar.
- b. Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
- c. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok dibidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.
- d. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat

²² Yuliansayah, *Akuntansi Desa...*, h.3

disuatu wilayah. Tiga sumber hukum yang dianut dalam desa, yakni :

- 1) Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat.
 - 2) Agama/kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri.
 - 3) Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- e. Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong.

Menurut Roucek dan Warren, masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut:²³

- a. Peranan kelompok primer sangat besar
- b. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat
- c. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
- d. Struktur masyarakat bersifat homogen

²³ Nurman, *Strategi...*, h.228

- e. Tingkat mobilitas sosial rendah
- f. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi
- g. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan

Berdasarkan pemaparan diatas menurut penulis karakteristik desa yaitu masyarakat desa bersifat agraris, struktur masyarakat bersifat homogen, kepadatan jumlah penduduk rendah, pembentukan kelompok sangat ditentukan oleh faktor geografis, tingkat mobilitas rendah, serta masih menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.

3. Kewenangan Desa

Berdasarkan UU. N0.6 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan desa meliputi:²⁴

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

4. Kelembagaan Desa

Kelembagaan desa merupakan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kelembagaan desa terdiri atas:

25

²⁵ Yuliansayah, *Akuntansi Desa...*, h.9

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai dengan penjelasan dalam UU. No. 6 Tahun 2014, kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemeberdayaan masyarakat desa. Kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas:

1) Sekretariat Desa

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan

APBDes, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa, menyusun Raperdes APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes.

2) Pelaksana Wilayah

Pelaksana wilayah merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

3) Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi.

Pemerintah desa menggunakan dana APBDes untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

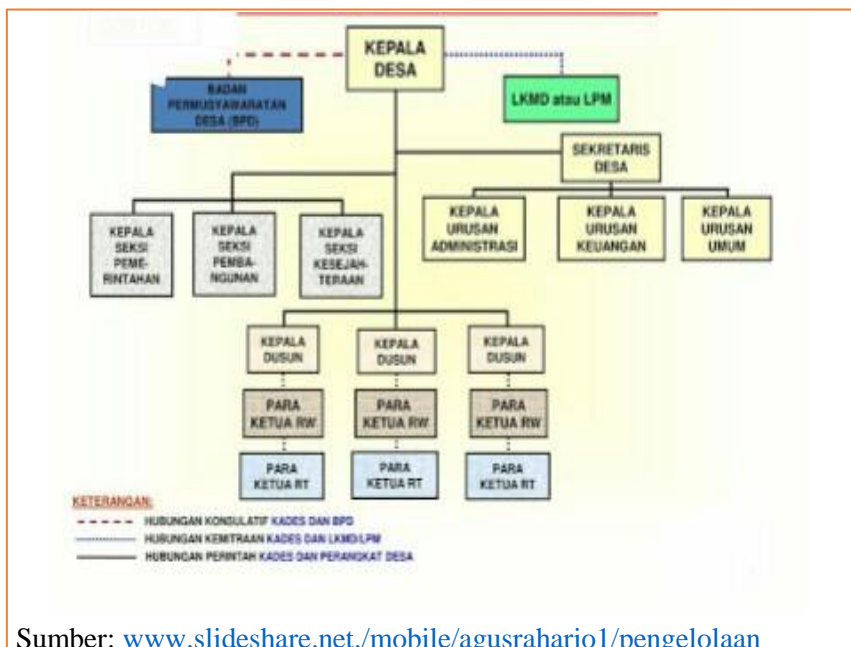
c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga masyarakat desa diantaranya seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi ditingkat masyarakat, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

d. Lembaga Adat Desa

Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Gambar 1 : Kelembagaan Desa



Sumber: www.slideshare.net/mobile/agusraharjo1/pengelolaan-keuangandanadesa11.

B. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horisontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Secara umum siklus pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gambar.2

Gambar 2: Siklus pengelolaan keuangan desa



Sumber: www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesada.pdf.

Penjelasan mengenai siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:²⁶

²⁶ Permendagri No113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang berlaku 1 (satu) tahun. RKPDDes harus mengacu kepada RPJMDes. RKPDDes merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun APBDDes.

RPJMDes disusun dan ditetapkan pada saat kepala desa dilantik melalui musyawarah desa. RKPDDes disusun dan ditetapkan pemerintah desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) yang dihadiri oleh masyarakat dan unsur-unsur desa pada saat mendekati akhir dari tahun anggaran berjalan. Setelah penetapan RKPDDes langkah selanjutnya adalah menetapkan APBDDes. Sebelum menetapkan APBDDes, sekretaris desa menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDDes).

Dokumen RAPBDDes diserahkan kepada kepala desa, selanjutnya dibawa kedalam forum musyawarah desa

(musdes) untuk ditetapkan menjadi APBDes berdasarkan kesepakatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan desember tahun berjalan. RKPDes dan APBDes ditetapkan melalui peraturan desa (perdes). Perdes merupakan produk kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD.

Tabel 2. Indikator perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

No	Indikator
1	Sekretaris desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes
2	Sekretaris desa menyampaikan RAPBDes kepada kepala desa
3	Kepala desa menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk disepakati bersama menjadi APBDes dalam bentuk Perdes
4	APBDes ditetapkan paling lambat bulan desember pada tahun anggaran sebelumnya

Sumber: Permendagri No113 Tahun 2014.

b. Penganggaran

Penganggaran dilaksanakan setelah RKPDes ditetapkan. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

c. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Pelaksana kegiatan mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa. SPP yang telah disetujui oleh kepala desa maka selanjutnya dilakukan pembayaran oleh bendahara desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Secara umum indikator pelaksanaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

No	Indikator
1	Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa
2	Pelaksana kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa

3	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4	Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran

Sumber: Permendagri No113 Tahun 2014.

d. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. Saat ini penatusahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama sistim keuangan desa (siskeudes). Siskeudes dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Secara umum indikator penatusahaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Indikator penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

No	Indikator
1	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
2	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
3	Bendahara desa mepertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

Sumber: Permendagri No113 Tahun 2014.

e. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya. Secara umum indikator pelaporan keuangan desa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Indikator pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota
2	Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan
3	Laporan akhir tahun dilaporkan disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya

Sumber: Permendagri No113 Tahun 2014.

f. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggung jawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Secara umum indikator tahap pertanggungjawaban disajikan dalam seperti tabel 6 berikut:

Tabel 6. Indikator pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat

Sumber: Permendagri No113 Tahun 2014.

2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada ditangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes (SPP)

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta
- d. melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib

- e. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa harus transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Segala bentuk dokumen pengelolaan keuangan harus dapat akses oleh masyarakat. Transparansi merupakan karakteristik yang memungkinkannya terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap apa yang diartikulasikan pemerintah dalam hal kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab setiap aktor dalam interaksi berpemerintahan. Meletakkan tanggung jawab satu-satunya pada sektor pemerintah bukanlah gagasan terbaik untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Tanggung jawab merupakan nilai penting yang semestinya berlaku pada semua elemen dalam proses pemerintahan.²⁷

- c. Partisipasif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Huntington, partisipasi sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat mengambil bentuk dukungan atau tantangan. Partisipasi ini boleh jadi bersifat spontan, berlanjut atau sporatis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.²⁸

²⁷ Muhadam labolo, *Dinamika Politik...*, h.83

²⁸ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h.103

Kaitanya dengan pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan desa. Baik dalam konteks perencanaan melalui musrembang, pelaksanaan setiap kegiatan, dan penggunaan dana.

- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBDes/perubahan APBDes.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

C. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).²⁹ ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan:³⁰

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan penghitungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 81 sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus)
- b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus)

²⁹ Perbup Tegal No.2 Tahun 2017

³⁰ Yuliansayah, *Akuntansi Desa...*, h.34

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus)
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus)

Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:

- a. Kepala desa
 - b. Sekretaris desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap Kepala desa perbulan
 - c. Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50%.
- 2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.**

Perhitungan ADD berdasarkan Perbup Tegal No. 2 Tahun 2017 ditetapkan atas dasar pagu alokasi dasar (PAD) ditambah dengan pagu alokasi formula (PABF). Besarnya PAD ditentukan 90% dari jumlah ADD kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa di kabupaten Tegal. Besaran PABF dibagi secara proporsional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pembobotan jumlah penduduk desa dengan bobot 25%, luas wilayah desa dengan bobot 10%, jumlah penduduk miskin dengan bobot 35%, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30%.

Pengelolaan ADD tidak dapat dipisahkan dari APBDes karena ADD merupakan salah satu komponen pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang ditransfer oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. ADD dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, intensif rukun tetangga dan rukun warga, bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang kemasyarakatan.

Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Pertanggungjawaban tersebut dilaporkan kepada bupati melalui kecamatan. Dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa dibina oleh Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten. Jika terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pengawasan ADD dilakukan oleh Inspektorat kabupaten dan tidak terpisahkan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika terjadi pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD, maka diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun

berikutnya dari jumlah proporsional yang seharusnya diterima atau bahkan menunda penyaluran ADD bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

D. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Syariah

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, hal ini tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam hal terkait dengan keuntungan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain, yaitu:³¹

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Prinsip ini mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia mendapatkannya berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapat ridha Allah. Dalam konteks

³¹ Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1, 2015, h.76

kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi diikatkan pada prinsip ibadah dan tujuan ilahi untuk memenuhi perintah Allah.³² Sebagaimana firman-Nya dalam Qs.Al-mulk:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan*

Prinsip tauhid merupakan pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang

³² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h.21

berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.³³ Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam.

Alam diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.³⁴ Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

a. Riba

Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Al-quran kata riab digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan, serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah secara kuantitatif. Menurut etimologi, kata riba bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh. Al-Syirbani mendefinisikan riba dengan kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti

³³ Darsono, et al, *Perbankan Syariah di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h.33

³⁴ Mardani, *Hukum...*,h.21

atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad.³⁵

Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.s Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.

Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah. Pengaraman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kedzaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kedzaliman.

³⁵ Mursal, *Implementasi...*, h.78

b. Maisir

Secara etimologis maisir berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja.³⁶ Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.³⁷ Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala betuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudaratn yang sangat besar. Larangan terhadap judi diantaranya terdapat dalam Q.s Al-Baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

³⁶ Ascarya, *Akad dan Poduk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, h.20

³⁷ M.Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Sleman: Aswaja Pressindo, 2016, h.92.

c. Gharar

Ketidakpastian dalam bahasa Arab disebut gharar yang berarti risiko atau bahaya. Dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial, gharar bisa mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan pihak lain. Didalam gharar mengandung tipu daya yang bisa terjadi dalam transaksi-transaksi bisnis yang menyebabkan ketidakadilan dalam bentuk apapun terhadap pihak manapun. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung gharar. Larangan ini didasarkan diantaranya dalam Qs. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*

d. Haram

Menurut ulama Hanafiyah, larangan dalam hukum Islam terdiri dari dua kategori, yaitu larangan secara material (materi, zat atau bendanya) dan larangan yang disebabkan faktor eksternal. Larangan yang bersifat material disebut

haram li dzatih dan larangan yang disebabkan faktor eksternal disebut *haram lighairih*. Larangan kategori pertama adalah keharaman daging babi, riba dan sebagainya. Sedangkan larangan kategori kedua, misalnya menjual barang halal dari hasil curian. Pada dasarnya barang tersebut halal dan tidak dilarang menjualnya, tetapi karena sistem atau cara (operasionalnya) mendapatkannya tidak benar, maka menjualnyapun menjadi terlarang.

Islam juga mempertimbangkan keadilan sebagai dasar pemerintahan. Prinsip kesatuan agama dan hukum harus dipraktikkan. Tanpa otoritas politik yang terorganisir eksistensi agama dan hukum bisa berbahaya. Tanpa dibatasi syariah, pemerintah akan menjadi tatanan politik yang tirani dan tidak adil. Perhatian pada keadilan bisa menghasilkan konvergensi kepentingan antara yang memerintah dan yang diperintah, dan melahirkan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kekuatan Islam dalam masyarakat. Ada dua faktor yang wajib ada, satu adalah kesadaran moral individual untuk tidak melanggar batasan yang ditentukan atas perilaku mereka dan kepatuhan otoritas politik terhadap hukum dalam memastikan implementasi peraturan syariah.³⁸

³⁸Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam:Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2008, h.15

3. Prinsip Maslahat

Hakikat dari kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawai dan ukhrawi. Material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam ber-maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek.³⁹ Secara luas, maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam *maqashid* (tujuan) syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap:

- a. Keimanan dan ketakwaan
- b. Keturunan
- c. Jiwa dan keselamatan
- d. Harta benda
- e. Rasionalitas

Kelima unsur tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam *maqashid* syariah secara terintegrasi.

4. Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong)

Prinsip ta'awun dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem sosial ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak

³⁹ Darsono, et al, *Perbankan Syariah...*, h.34

melupakan yang miskin. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsip tolong menolong digunakan sebagai landasan dalam asuransi syariah. Aplikasinya, dimana satu peserta dengan peserta yang lainnya saling menanggung risiko. Perintah tolong menolong sangat dianjurkan untuk perbuatan-perbuatan baik, bukan untuk perbuatan dosa. Landasan Prinsip ta'awun termuat dalam Q.s Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلُبُدَّ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*

5. Prinsip Keseimbangan (Tawazun)

Tawazun merupakan konsep keseimbangan yang ditawarkan Islam. Keseimbangan hidup antara amalan dunia dan akhirat. Hidup di dunia menjadi tidak terlepas dari kehidupan akhirat. Di dunia, manusia melakukan amal shaleh unruk menuju kemenangan sejati dan abadi (*falah*).⁴⁰ Konsep syariah menempatkan keseimbangan sebagai salah satu dasar dalam pembangunan sistem ekonomi. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi keseimbangan:⁴¹

- a. Pembangunan material dan spritual
- b. Pengembangan sektor keuangan dan sektor riil
- c. Risk and Return
- d. Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam

Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip syariah terkait pengelolaan keuangan yang telah dijelaskan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Kesejahteraan tersebut diartikan dengan

⁴⁰ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.268

⁴¹ Darsono, et al, *Perbankan Syariah...*, h.33

tercapainya pemenuhan kesejahteraan hidup di dunia (aspek sosial dan ekonomi) yang ditandai dengan semakin menyempitnya jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang mampu dan kurang mampu, serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (maslahat). Kondisi tersebut yang akan mengantarkan manusia pada pencapaian tujuan akhir yaitu kesejahteraan di akhirat yang berarti terpenuhinya kewajiban manusia sebagai wakil Allah di dunia yang mempunyai tugas utama memakmurkan bumi dan beribadah kepadanya.⁴²

Dalam mengelola keuangan secara syariah, tidak dapat terlepas dari hukum keuangan syariah yang dalam perspektif Islam diyakini apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai petunjuk-Nya akan mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa yang melaksanakannya. Hal ini sudah terbukti di negara-negara yang konsekuen melaksanakannya tidak pernah terjadi dilanda krisis ekonomi dan moneter sebagaimana negara-negara yang menjalankan sistem ekonomi konvensional. Atau dengan kata lain ekonomi negara-negara yang menjalankan ekonomi syariah ini cenderung lebih stabil karena dalam sistem ekonomi syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang fokus pada *amar ma'ruf nahi mungkar*.⁴³

Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisien sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem keuangan yang

⁴² *Ibid*, h.35

⁴³ M.Ma'ruf Abdullah, *Hukum...*, h.3

berfungsi dengan baik akan menciptakan investasi dengan mengidentifikasi dan menandai peluang bisnis yang baik, memobilisasi simpanan, memonitor kinerja para manajer, memicu perdagangan, menghindari dan mendiversifikasi risiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada akhirnya mengarah kepada alokasi efisien sumber daya, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.⁴⁴

Dalam sebuah sistem keuangan, pasar keuangan dan bank melaksanakan fungsi vital formasi modal, monitoring, pengumpulan informasi, dan memfasilitasi pembagian risiko. Sistem finansial yang efisien diharapkan melaksanakan beberapa fungsi. Pertama, sistem tersebut harus memfasilitasi intermediasi keuangan yang efisien untuk mengurangi biaya informasi dan alokasi. Kedua, sistem tersebut harus didasarkan pada sistem pembayaran yang stabil. Ketiga, seiring dengan meningkatkan globalisasi dan tuntutan integrasi finansial, sistem keuangan harus menciptakan pasar uang dan modal yang efisien serta likuid. Dan pada akhirnya sistem tersebut harus memiliki pasar yang berkembang dengan baik untuk memperdagangkan risiko, dimana agen ekonomi dapat membeli dan menjual perlindungan terhadap risiko peristiwa (*event risk*) serta risiko finansial.

⁴⁴ Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar*,...,h,159

Sistem keuangan Islam dapat dikatakan beroperasi secara efisien jika tingkat pengembalian dalam sektor keuangan sebanding dengan yang ada dalam sektor riil. Di banyak negara Islam, defisit fiskal dibiayai lewat sistem perbankan. Untuk mengurangi biaya pendanaan ini, sistem finansial ditekan oleh batasan tingkat suku bunga bank yang dipertahankan secara artifisial. Dengan demikian, penekanan finansial merupakan bentuk perpajakan yang memberikan pemasukan substansi bagi pemerintah. Keterlibatan masif pemerintah dalam ekonomi membuat pengurangan pengeluaran mereka menjadi hal yang sulit. Keuntungan ekonomi dari operasi sistem keuangan Islam dapat berupa:⁴⁵

- a. Pengeluaran pemerintah yang dirasionalisasikan secara penuh
- b. Pemasukan dari pajak, dan pendapatan yang berasal dari harta yang secara sah ditempatkan dalam domain pemerintah oleh syariah, dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah.
- c. Sektor finansial dapat diliberalisasikan guna memungkinkan pengembalian dalam sektor ini merefleksikan pengembalian dalam ekonomi riil
- d. Pasar modal dapat dikembangkan untuk membantu pendanaan proyek investasi diluar institusi perbankan
- e. Struktur sistem perbankan dapat disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan supervisi perbankan yang kuat dan

⁴⁵ *Ibid*, h.186

regulasi yang cermat untuk mengantisipasi berbagai risiko dalam beragam transaksi.

BAB III

PROFIL DESA MARGA AYU

A. Sejarah Desa Marga Ayu

Desa Marga Ayu adalah salah satu desa di kecamatan Margasari kabupaten Tegal. Desa Marga Ayu memiliki sejarah yang luar biasa untuk mencapai kondisi yang termasuk dalam desa berkembang sampai dengan sekarang ini. Sebelum bernama desa Marga Ayu dahulu bernama pedukuhan Bedor. Dahulu desa Marga Ayu termasuk dalam wilayah desa Kalisalak. Dukuh Bedor semakin lama semakin berkembang dan penduduknya semakin bertambah padat yakni pada tahun 1998 jumlah penduduknya mencapai 3500 jiwa yang terhimpun dalam 800 KK.

Kesenjangan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat pedukuhan Bedor pada waktu itu menimbulkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk melepaskan diri dari desa Kalisalak. Atas prakarsa dan musyawarah dari tokoh masyarakat desa, maka dihasilkan keputusan untuk mendirikan sebuah desa dengan nama Marga Ayu yang mempunyai arti jalan bagus. Setelah proses berjalan selama satu tahun, tepat tanggal 4 Nopember 1999 dukuh Bedor diresmikan menjadi desa persiapan sekaligus diganti nama menjadi desa persiapan desa Marga Ayu. Desa persiapan desa Marga Ayu dipimpin pertama oleh Bapak Faizin selaku pejabat sementara kades yang pada saat itu adalah kasi kesra desa Kalisalak yang berdomisili di dukuh Bedor.

Desa Marga Ayu diresmikan berdasarkan keputusan bupati Tegal nomor:146.1/1174/2000 tertanggal 21 Desember 2000. Periode 2000-2002 desa Marga Ayu dipimpin oleh pelaksana Dalam perkembangannya desa Marga Ayu baru mengalami pergantian kepala desa sebanyak dua kali. Yaitu Bapak Muntardo (2002-2012), dan Bapak Fatchuroji (2013-2018). Sebagai desa yang termasuk dalam kategori desa yang baru dibandingkan dengan desa yang lain yang ada di kecamatan Margasari, desa Marga Ayu termasuk pesat perkembangannya. Hal tersebut dapat dilihat dengan berdirinya beberapa perusahaan seperti PT SUJA, PT New Hope, PT Bosowa Semen, dan beberapa perusahaan yang sedang dalam proses pendirian. Dengan visi dan misi yang berkualitas dan dengan kondisi geografis yang mendukung, besar harapan desa Marga Ayu menjadi desa yang maju.

B. Kondisi Geografis Desa Marga Ayu

Secara geografis desa Marga Ayu terletak di kawasan strategis karena dilewati jalur nasional pejalan – purwokerto, dan langsung berbatasan dengan kabupaten Brebes. Selain itu desa Marga Ayu juga dilewati jalur kereta api Jakarta – Jogjakarta. Secara keseluruhan luas wilayah desa Marga Ayu adalah 843.961 Ha, mempunyai 3 (tiga) Dukuh yaitu Marga Ayu, Kalipasir 1 dan Kalipasir 2, dan memiliki 15 RT dan 4 RW.

1. Batas wilayah desa Marga Ayu

- a. Sebelah Utara : desa Songgom, kec. Songgom, kab. Brebes
- b. Sebelah Selatan : desa Pakulaut, kec. Margasari
- c. Sebelah Barat : desa Wlahar, kec. Larangan, kab. Brebes
- d. Sebelah Timur : desa Kalisalak, kec. Margasari

2. Topografi

- a. Luas kemiringan : datar 195,7 Ha, sedang 750 Ha, Tinggi 151 Ha
- b. Ketinggian : 36 mdpl

3. Hidrologi : Irigasi berpengairan teknis dan tadah hujan**4. Klimatologi**

- a. Suhu 25-27°C
- b. Curah hujan 2000-2500 mm

5. Luas lahan pertanian

- a. Sawah tadah irigasi : 232 Ha
- b. Sawah tadah hujan : 164 Ha

6. Luas lahan pemukiman: 102,3 Ha

C. Visi, Misi, dan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Marga Ayu

1. Visi Desa

“Terwujudnya desa Marga Ayu menjadi desa mandiri, religius, dan berbudaya melalui bidang ekonomi pertanian, industri yang didukung bidang peternakan kebersamaan”⁴⁶.

a. Nilai-nilai yang melandasi

Selama bertaun-tahun desa Marga Ayu menyandang gelar sebagai kategori desa berkembang. Sebuah sebutan yang kurang membanggakan padahal sumber daya yang ada cukup memadai, hanya saja penanganannya kurang maksimal. Sebagian besar warga adalah petani dan buruh tanu dan ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil.

b. Makna yang terkandung:

- 1) Terwujudnya, terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan desa Marga Ayu yang mandiri secara ekonomi
- 2) Desa Marga Ayu, suatu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensiya dalam sistem pemerintahan di wilayah desa Marga Ayu

⁴⁶ www.desamargaayu.com.

- 3) Mandiri, suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
- 4) Religius, masyarakat yang beragama
- 5) Berbudaya, mengutamakan adat istiadat yang dikolaborasikan dengan aturan negara dalam penyelesaian permasalahan warga masyarakat.
- 6) Pertanian, bahwa sektor pangan adalah hal utama dalam perekonomian, sehingga tidak akan terjadi rawan pangan di desa Marga Ayu
- 7) Industri, dengan mulai berdirinya beberapa industri di desa Marga Ayu untuk menunjang perekonomian masyarakat.

2. Misi Desa

- a. Meningkatkan iman dan taqwa masyarakat desa
- b. Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian dan peternakan
- c. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa
- d. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui otonomi daerah
- e. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia melalui pendidikan formal maupun informal
- f. Meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan desa

- g. Meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan sehingga menjadi desa yang mandiri

3. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

Kepala Desa	: Fatchuroji
Sekretaris Desa	: Aminudin, ST
Kaur Perencanaan	: Wasito
Kaur Keuangan	: Atika Emilia S.Pd
Kaur TU dan Umum	: Jamal Kholil
Kaur Pemerintahan	: Ali Nursidik
Kaur Kesejahteraan	: Syaiful Qodar
Kaur Pelayanan	: M. Ikromulloh
Staf	: Faozan, Makfuri, Sonhaji

D. Potensi Sumber Daya Manusia Desa Marga Ayu

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Marga Ayu adalah 5.779 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) jiwa yang terdiri dari 3.064 (tiga ribu enam puluh empat) jiwa laki-laki dan 2.715 (dua ribu tujuh ratus lima belas) jiwa perempuan. Jumlah KK di desa Marga Ayu sebanyak 1.735 (seribu tujuh ratus tiga puluh lima).

2. Pendidikan Penduduk

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Marga Ayu
Menurut Usia

Tingkat Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	186	198
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	35	45
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	11	7
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	290	285
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	320	310
Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SD	55	63
Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTP		
Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	255	270
Tamat SD/ sederajat	76	56
Tamat SMP/ sederajat	236	215
Tamat SMA/ sederajat	320	243
Tamat D-1/ sederajat	5	3
Tamat D-2/ sederajat	7	4
Tamat D-3/ sederajat	4	2
Tamat S-1/ sederajat	9	2
Tamat S-2/ sederajat	1	0
Tamat S-3/ sederajat	0	0
Jumlah	1810	1703
Jumlah Total	3514	

Sumber : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Serta
Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan
Kelurahan desa Marga Ayu Tahun 2017

Dari tabel tingkat pendidikan penduduk desa dapat dilihat bahwa penduduk desa Marga Ayu mayoritas berpendidikan sampai dengan tingkat SLTA. Hanya sekian kecil yang berpendidikan tinggi, yaitu tamat D1/ sederajat sebanyak 8 (delapan) orang, D2/ sederajat sebanyak 11 (sebelas) orang, D3/ sederajat sebanyak 6 (enam) orang, S1/ sederajat sebanyak

11 (sebelas) orang, S2/ sederajat sebanyak 1 (satu) orang, dan belum ada yang tamat S3.

E. Mata Pencanharian dan Angkatan Kerja Penduduk Desa Marga Ayu

1. Mata Pencanharian Penduduk Desa Marga Ayu

Tabel 8. Mata Pencanharian Penduduk Desa Marga Ayu

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
Petani	217	167
Buruh tani	620	570
Buruh migran perempuan		15
Buruh migran laki-laki	75	
Pegawai Negeri Sipil	6	2
Pedagang keliling	4	2
Peternak	15	0
Pensiunan TNI/POLRI	7	2
Jumlah	944	758
Jumlah Total Penduduk	1702	

Sumber : Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Serta Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan desa Marga Ayu Tahun 2017

Dari tabel mata pencaharian penduduk dapat disimpulkan mayoritas penduduk desa Marga Ayu bekerja sebagai petani dan buruh tani yaitu jika digabungkan berjumlah sebanyak 1574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) orang. Sedangkan pekerjaan lainnya yakni buruh migran sebanyak 90 (sembilan puluh) orang, PNS 8 (delapan) orang, pedagang keliling 6

(enam) orang, peternak 15 (lima belas) orang, dan pensiunan TNI/Polri sebanyak 9 (sembilan) orang.

2. Angkatan Kerja Penduduk Desa Marga Ayu

Tabel 9. Tenaga Kerja Berdasarkan Usia

Tenaga Kerja	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Penduduk usia 0 - 6 tahun	387	398
Penduduk usia 7 - 18 tahun yang masih sekolah	659	557
Penduduk usia 18 - 56 tahun (a + b)	1388	1370
a. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang bekerja	849	899
b. Penduduk usia 18 - 56 tahun yang belum/tidak bekerja	52	489
Penduduk usia 56 tahun ke atas	523	497
Angkatan Kerja		
Jumlah	2957	2822
Jumlah total (Laki-Laki + Perempuan)	5779	

Sumber: Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Serta Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan desa Marga Ayu Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja sebanyak 2758 (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan puluh lima) orang, dan yang belum/tidak bekerja sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu) orang. Artinya dari jumlah total 5779 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) sekitar 47% penduduk desa Marga Ayu bekerja.

F. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perencanaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah desa bersama Badan Permasyarakatan Desa menetapkan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan,

belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.678.943.042,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari:⁴⁷

- | | |
|----------------------------|------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp. 81.000.000,- |
| b. Pendapatan Transfer | |
| 1) Dana Desa | Rp.823.217.854,- |
| 2) Bagi Hasil Daerah | Rp. 71.264.800,- |
| 3) Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp.425.232.631,- |

⁴⁷ RKPDesa Marga Ayu Tahun 2017

c. Bantuan Keuangan

- 1) Bantuan Provinsi untuk RLTH Rp. 20.000.000,-
- 2) Bantuan Provinsi untuk KPMD Rp. 5.000.000,-
- 3) Bantuan Kabupaten untuk PDPMRp. 70.000.000,-
- 4) Bantuan Ketahanan MasyarakatRp. 30.000.000,-

d. Pendapatan Lain-lain

- 1) Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya
Rp.153.277.757,-

Jumlah Pendapatan

Rp.1.678.943.042,-

2. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Perbup Tegal no 33 tahun 2013 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Adapun asumsi belanja desa tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
Rp.554.052.491,-
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa
Rp.533.765.294,-
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
Rp. 36.215.500,-

- d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Rp.550.680.000,-

Jumlah Belanja

Rp.1.674.713.285,-

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan Pembiayaan

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Silpa | Rp. – |
| 2) Pencairan Dana Cadangan | Rp. 4.229.757,- |
| 3) Hasil kekayaan desa yang
dipisahkan | Rp. – |

- b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1) Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 4.229.757,- |
| 2) Penyertaan Modal Desa | Rp. – |

G. Prioritas Program dan Kegiatan

Permasalahan yang ada di desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal saja, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Prioritas program dan kegiatan desa tahun 2017 adalah sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*

1. Program kegiatan yang berasal dari pagu indikatif desa

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat
 - 2) Operasional kantor
 - 3) Operasional BPD
 - 4) Operasional RT/RW
 - 5) Pendataan desa
 - 6) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa
 - 7) Operasional penderasan PBB
 - 8) Pengukuhan dan perekrutan perangkat desa
 - 9) Musyawarah desa
 - 10) BOP raskin
 - 11) Rehab pendopo
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 1) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa
 - 2) Pembuatan jalan baru
 - 3) Pembuatan drainase
 - 4) Pemasangan MSO (Mitranet Software Online)
 - 5) Pembangunan jamban sehat
 - 6) Pembangunan rumah tidak layak huni untuk warga kurang mampu
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Pelatihan ukur tanah
- 2) Pelatihan siskeudes
- 3) Penyertaan modal BUMDES

2. Program Kegiatan yang didanai Pendapatan Asli Desa

Program dan kegiatan yang didanai oleh pendapatan asli desa adalah untuk tunjangan petugas kebersihan dan tunjangan guru ngaji dan madrasah serta tambahan penghasilan kades dan perangkat desa lainnya guna meningkatkan kesejahteraan perangkat pemerintahan desa agar tercipta kerja pelayanan yang prima.

3. Program Kegiatan yang didanai Bantuan Keuangan Provinsi

Program dan kegiatan yang didanai oleh bantuan keuangan provinsi adalah untuk kegiatan pembangunan jamban sehat di rumah warga khususnya di dukuh Kalipasir 1, bantuan untuk rumah tidak layak huni serta pemasangan MSO di kantor BUMDES “Bangun Artha Sejahtera” untuk meningkatkan pelayanan.

H. Badan Permusyawaratan Desa Marga Ayu

Badan permusyawaratan desa atau yang disingkat dengan (BPD) merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta

meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis yang masa keanggotaannya selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah. Anggota badan permusyawaratan desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Susunan pengurus BPD desa Marga Ayu:

Ketua : Wahyudi S.Pd

Wakil Ketua	: Suroso, S.Pd.i
Sekretaris	: Tohari, S.Pd
Anggota	: Sunaryo, S.Pd
Anggota	: Toipah

I. Kelembagaan Masyarakat Desa Marga Ayu

Didalam UU desa diatur mengenai kelembagaan desa. Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) antara lain rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, pos pelayanan terpadu (Posyandu), dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD). Lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan LKD diatur dalam peraturan desa, dengan rincian tugas:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Sedangkan fungsi yang dimiliki oleh LKD sebagai berikut

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa

4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Desa Marga Ayu memiliki lembaga kemasyarakatan desa dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

1. Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Marga Ayu

Ketua Umum	: Taufiq, S.Ag
Ketua Harian	: Fatkhurozak
Sekretaris	: Cahyono, S.Pd
Bendahara	: Saadatun
Sie. Keagamaan	: Mashuri
Sie. Pendidikan	: Masroni, S.Th.i
Sie. Seni Budaya	: Topik
Sie. Pemuda dan OR	: Farikhin
Sie. Lingkungan	: Walib
Sie. Sosial	: Watam
Sie. Gotong Royong	: Wutuh
Sie. Kesehatan	: Tarmuji
Sie. Kesra	: Abdul Rais
Sie PKK	: Isni

2. Susunan Tim Penggerak PKK Desa Marga Ayu

Ketua Tim	: Isni Fatchuroji
Ketua 1	: Sri Yuyun Margiasih
Ketua 2	: Anik Rosmala Dewi, Amd
Sekretaris	: Iin Rosalia Indah

Wakil Sekretaris	: Syahadah
Bendahara	: Evi Andriyani
Wakil Bendahara	: Yuli Anita
Ketua Pokja 1	: Elfatun Ma'fiah
Wakil	: Iin Anisah
Anggota	: Ika Muflikha, Dwi
Ketua Pokja 2	: Wahyuningsih
Wakil	: Tri Ambarwati
Anggota	: Wiharti, Nining
Ketua Pokja 3	: Nurjaeti
Wakil	: Uswatun Khasanah
Anggota	: Saadatun, Sutirah
Ketua Pokja 4	: Nenden Mifrokhah A.Md
Wakil	: Tarwi
Anggota	: Mudaroh, Sismukhaeni.

3. Data Pejabat Rukun Warga dan Rukun Tetangga Desa

Marga Ayu

Ketua RW 01	: Saifurroyyan
Ketua RW 02	: Sayuti
Ketua RW 03	: Watam
Ketua RW 04	: Sakrad
Ketua RT 01/01	: Nursidik
Ketua RT 02/01	: Dewi Anjasmara
Ketua RT 03/01	: Tardi
Ketua RT 04/01	: Sugiyanto
Ketua RT 05/01	: Edi Purwanto
Ketua RT 01/02	: Tohidin
Ketua RT 02/02	: Samsudin
Ketua RT 03/02	: Ahmad Fauzi
Ketua RT 04/02	: Dirkun
Ketua RT 01/03	: Erpin
Ketua RT 02/03	: Suwondo
Ketua RT 03/03	: Tarhudi
Ketua RT 01/04	: Darun

Ketua RT 02/04 : Sugiyanto
Ketua RT 03/04 : Sukir

4. Susunan Pengurus Karang Taruna Desa Marga Ayu

Ketua : Heru Sutanto
Wakil Ketua : M. Ikromulloh
Sekretaris : Dodi Afifudin
Wakil Sekretaris : Mangun Purnomo
Bendahara : Sanuri
Wakil Bendahara : Hendra
Sie Pedidikan : Opsenen
Anggota : Dewi Anjasmara
Seksi Olahrag a : Nanang Alim
Anggota : Slamet
Seksi Usaha Kesos : Aji Prasetyo
Anggota : Haryanto
Seksi Humas : Musa
Anggota : Suwaryo
Seksi Kerohanian : Jamal Kholil
Anggota : M. Didi Masyudha
Seksi Kesenian : Ahmad Faisal
Anggota : Niken

BAB IV
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA MARGA
AYU KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2017

A. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Tahun 2017

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengelolaan ADD meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua tahapan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan. Tahapan tersebut berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Besarnya dana ADD kabupaten Tegal tahun 2017 yang dialokasikan kepada 281 (dua ratus delapan puluh satu) desa adalah sebesar Rp. 120.521.520.000,- (seratus dua puluh milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Desa Marga Ayu pada tahun 2017 mendapatkan ADD sebesar Rp. 425.232.631 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam

ratus tiga puluh satu rupiah). Realisasi penggunaan ADD desa Marga Ayu adalah sebesar Rp. 346.398.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Silpa ADD pada tahun 2017 sebesar Rp. 78.834.631,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Silpa tersebut berasal dari penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan BPD, honor pengelola keuangan dan operasional kantor. Jumlah silpa tersebut lebih kecil dari pada silpa tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 153.277.757,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pada tahun 2017 terjadi kekosongan perangkat desa dari bulan Januari s/d April. Hanya ada satu perangkat desa definitif yang aktif. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, pemerintah desa melakukan perekrutan perangkat desa sebanyak 6 (enam) orang. Perangkat desa yang baru dilantik pada tanggal 16 Mei 2017 sesuai dengan SK Kepala Desa Marga Ayu No. 05 tahun 2017 tentang pengangkatan perangkat desa dalam jabatan dilingkungan pemerintah desa Marga Ayu. Berdasarkan SK tersebut kepala desa melantik 6 (enam) orang perangkat desa baru yang dapat dilihat dalam tabel berikut:⁴⁹

⁴⁹ SK kepala desa Marga Ayu No. 05 tahun 2017

Tabel 10. Daftar nama perangkat desa yang diangkat dalam jabatan dilingkungan pemerintah desa Marga Ayu tahun 2017.

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Jabatan
1	Aminudin	Demak, 10 Juni 1982	Sekretaris Desa
2	Ali Nursidik	Tegal, 29 April 1979	Kasi Pemerintahan
3	M. Ikromulloh	Tegal, 11 Januari 1993	Kasi Pelayanan
4	Syaiful Qodar	Tegal, 03 Juni 1979	Kasi Kesejahteraan
5	Atika Emilia	Tegal, 26 November 1990	Kur Keuangan
6	Jamal Kholil	Tegal, 07 Mei 1981	Kasi TU dan Umum

Sumber: SK kepala desa Marga Ayu No.05 tahun 2017

Perangkat desa yang baru dituntut untuk dapat menguasai pengelolaan keuangan desa. Untuk itu, pemerintah desa melakukan kegiatan pelatihan siskeudes (sistim keuangan desa) yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 Juni 2017. Tujuan kegiatan ini adalah supaya perangkat desa mengetahui dan mampu mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat menguasai aplikasi siskeudes. Mengingat pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat berisiko. Pelatihan tersebut dihadiri oleh perangkat desa yang baru. Dalam tahap awal pengelolaan keuangan desa, perangkat desa dibantu oleh tim pendamping supaya tidak terjadi kesalahan.

Gambar 3. Undangan pelatihan siskeudes

PEMERINTAH DESA MARGA AYU
KECAMATAN MARGASARI
KABUPATEN TEGAL
Alamat : Jl. H. Uman No 03 Marga Ayu Kec. Margasari Kab. Tegal Kode Pos. 52463

Nomor : 025/Ds-13/VI/2017
Lampiran :
Perihal : UNDANGAN

Marga Ayu, 16 Juni 2017

Kepada Yth.
Perangkat Desa Marga Ayu

Di Tempat

Menghaturap dengan hormat kehadiran Bapak/Saudara pada :

Hari/Tanggal : 17, 19, 20 Juni 2017
Waktu : Jam 15.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa MARGA AYU
Acara : Pelatihan Siskeudes
Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Bendahara
Desa Marga Ayu Tahun 2017

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas kehadiran Bapak/ Ibu/Saudara

Kepala Desa Marga Ayu
[Signature]
KACHURUHI

Tembusan: Kepada Yth.
1 BPD Desa Marga Ayu
2 Arsip

Sumber: LPJ ADD desa Marga Ayu tahun 2017

Secara lebih mendalam analisis pengelolaan ADD desa Marga Ayu tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan sesuatu yang menjadi tujuan yang akan dicapai pada waktu yang akan datang serta menentukan tujuan dan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan

desa. Secara dokumentatif pencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa).

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan ADD dilakukan dengan menjangring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. ADD adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musrenbangdes.

Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah daftar program kegiatan hasil musrenbangdes yang didanai oeh ADD yang dapat dilihat dalam tabel 11.

Tabel 11. Program kerja pemerintah desa Marga Ayu tahun 2017 yang dibiayai dari ADD

NO	Program
1	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
2	Tunjangan BPD
3	Operasional kantor desa
4	Honor pengelolaan keuangan desa
5	Operasional BPD
6	Operasional RT / RW
7	Kegiatan pendataan dan pengisian data desa
8	Musyawarah desa
9	Kegiatan BOP Raskin
10	Penyelenggaraan LINMAS
11	Operasional LPMD
12	Operasional PKK
13	Operasional Karang Taruna
14	Kegiatan Pelatihan SISKEUDES
15	Kegiatan pelatihan ukur tanah
16	Kegiatan operasional peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat

Sumber: APBDes Desa Marga Ayu 2017

Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan

masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh ketua RW 01:⁵⁰

“sebelum mengikuti musrenbangdes, saya berkoordinasi dengan ketua RT yang masuk dalam RW saya untuk mendata dan membawa usulan dari masyarakat, tentunya usulan tersebut kami dapatkan dengan turun secara langsung. Dari usulan tersebut kami sampaikan kepada forum untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa untuk menentukan kebijakan”.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu tokoh masyarakat desa Marga Ayu untuk mengetahui informasi tentang rapat perencanaan ADD yaitu sebagai berikut:⁵¹

“saya sebagai masyarakat mengetahui desa mempunyai sumber pendapatan yang namanya ADD, dalam perencanaannya biasanya kami diundang untuk mengikuti musrenbangdes. Pemerintah desa selalu memberikan undangan jika ada kegiatan”.

Berikut pernyataan sekretaris desa Marga Ayu, Bapak Aminudin:⁵²

“Pada saat Musrenbangdes, kan dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan kecamatan, kepala desa memimpin musrenbangdes, disitu disampaikan RPJMDes dan aspirasi dari masyarakat kamiampung”.

⁵⁰ Wawancara dengan Ketua RW.01 Bapak Syaifurroyan, Senin, tanggal 18 juni 2018, pukul 19.00 Wib di rumah beliau

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Fatkhurozak, Senin tanggal 18 Juni 2018 Pukul 16.00 Wib di rumah beliau

⁵² Wawancara dengan Sekdes Marga Ayu Bapak Aminudin ST, Jum'at 23 Juni 2018, pukul 09.00 Wib di balai desa Marga Ayu

Setelah musrenbangdes dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah kepala desa membentuk tim untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Tim tersebut ditunjuk berdasarkan pertimbangan kepala desa. Setelah RKPDDes disusun, kemudian tim melaporkan hasil keputusan kepada pemerintah desa untuk di musyawarahkan dalam forum yang bernama musyawarah desa (musdes).

RKPDDes merupakan dokumen penting perencanaan pembangunan desa selama satu tahun dan dijadikan acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Setelah Pemerintah Desa menetapkan RKPDDes, Tim pelaksana kegiatan ADD menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal ini di terangkan oleh syaiful godar bahwa:⁵³

“Kita menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Yang jelas dalam pembuatan RAB yang berkaitan dengan pembelian kita tidak boleh melebihi standar harga kabupaten. Kita bahas berapa anggaran yang digunakan untuk pembangunan.

Hasil dari RAB tadi di kumpulkan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). RAPBDes yang telah disusun kemudian dirapatkan dalam musyawarah desa (musdes) dan ditetapkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi APBDDes. APBDDes ditetapkan paling lambat pada bulan desember tahun

⁵³ Wawancara dengan anggota TPK desa Marga Ayu, Bapak Syaiful godar, Selasa, tanggal 19 Juni 2018, Pukul 16.00 Wib di rumah beliau

berjalan. RKPDDes dan APBDDes ditetapkan melalui peraturan desa (perdes). APBDDes memuat pendapatan dan pengeluaran desa untuk dijadikan pedoman penyelenggaraan program kegiatan selama satu tahun anggaran. RKPDDes tahun 2017 desa Marga Ayu sendiri ditetapkan pada tanggal 11 November 2016. Sedangkan APBDDes tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2017.

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, APBDDes ditetapkan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan. Namun kenyataannya APBDDes desa Marga Ayu baru ditetapkan pada tanggal 6 Juni tahun 2017. Hal tersebut tentunya melebihi dari target waktu yang telah ditentukan. Kenyataan tersebut tidak dibantah oleh sekretaris desa (sekdes) Marga Ayu. Berikut ini adalah keterangan sekdes Marga Ayu:⁵⁴

“Penetapan APBDDes tahun 2017 memang tidak tepat waktu. hal tersebut terjadi karena ada beberapa permasalahan, pertama penetapan jumlah DD 2017 dari pusat tidak diakhir tahun 2016, tetapi pada bulan april 2017. Selain itu tahun 2017 kan pengelolaan keuangan menggunakan siskeudes, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sekarang melalui siskeudes mas. SDM perangkat desa sebelumnya mohon maaf kurang menguasai teknologi, maka proses pengelolaan keuangan termasuk perencanaan tertunda mas. Ada satu hal lagi, pada waktu itu ada hajat pendaftaran perangkat baru, karena hal tersebut desa

⁵⁴ Wawancara dengan Sekdes Marga Ayu, Bapak Aminudin ST...,

mengambil keputusan APBDes ditetapkan saat perangkat baru sudah dilantik”.

Berdasarkan pernyataan dari sekdes Marga Ayu, bahwa penetapan APBDes tahun 2017 tidak tepat waktu, karena penetapan jumlah Dana Desa (DD) tahun 2017 baru ditetapkan oleh pemerintah pusat pada bulan April 2017. Hal tersebut menjadikan penetapan APBDes terlambat karena DD merupakan salah satu komponen pendapatan dalam APBDes selain ADD. Hal lain yang menjadikan penetapan APBDes terlambat adalah pada waktu itu terjadi masa pendaftaran/perekrutan perangkat desa kemampuan perangkat lama yang kurang menguasai teknologi, karena pengelolaan keuangan desa tahun 2017 telah menggunakan aplikasi siskeudes. Atas dasar tersebut diputuskan oleh desa dan BPD bahwa penetapan APBDes tahun 2017 ditetapkan setelah perangkat baru dilantik.

Indikator yang digunakan peneliti dalam menganalisa tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam hal ini ADD desa Marga Ayu tahun 2017 adalah dengan menggunakan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Secara ringkas indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel 12.

Tabel 12. Analisis Indikator kesesuaian Perencanaan ADD desa Marga Ayu tahun 2017 menurut Permendagri No.113 Tahun 2014

No	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak sesuai)
1	Sekretaris desa menyusun rancangan RAPBDes berdasarkan RKPDes	RKPDes dihasilkan dari musrenbangdes dengan melihat RPJMDes. Setelah musrenbangdes dilaksanakan maka kepala desa membentuk tim penyusun RKPDes. Setelah itu RKPDes dimusyawarahkan dan ditetapkan oleh kepala desa.	S
2	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan RAPBDes kepada kepala desa	Setelah RKPDes disahkan, maka tim penyusun selanjutnya membuat RAPBDes dan dilaporkan kepada kepala desa melalui sekretaris desa.	S
3	Kepala desa menyampaikan Rancangan RAPBDes kepada BPD untuk disepakati bersama menjadi APBDes dengan mengeluarkan	RAPBDes dilaporkan kepada BPD dan melalui musdes dan ditetapkan bersama dengan BPD dalam bentuk peraturan desa.	S

	n Perdes		
4	APBDes ditetapkan paling lambat bulan desember tahun anggaran sebelumnya	APBDes desa Marga Ayu tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 6 Juni tahun 2017	TS

Sumber: Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dengan menggunakan indikator perencanaan yang telah dilakukan, bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Tahun 2017 secara prosedur telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun secara target waktu perencanaan pengelolaan keuangan desa Marga Ayu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Hal tersebut

berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bendahara desa:⁵⁵

“semua pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Seperti ADD yang merupakan pendapatan transfer masuk melalui rekening desa. Desa memiliki satu rekening sebagai penyimpanan dana tunggal yang dimiliki desa.”

Pelaksanaan dalam kegiatan yang didanai oleh ADD kepala desa membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), Hal ini diterangkan oleh Narasumber Bapak Syaiful Qodar bahwa:⁵⁶

“Untuk pelaksanaan kegiatan ADD ada Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. tujuannya untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD. Tim Pelaksana Kegiatan wajib melaporkan kepada Kepala Desa”.

Menurut sayriful qodar sebelum melaksanakan ADD kegiatan tim harus membuat RAB kegiatan. Tim pelaksana bertanggungjawab terhadap segala pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD.

Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan. RAB tersebut

⁵⁵ Wawancara dengan bendahara desa Marga Ayu, Atika Emilia S.Pd, Sabtu 23 Juni 2018, pukul 19.00 Wib dirumah beliau.

⁵⁶ Wawancara dengan anggota TPK desa Marga Ayu, Bapak Syaiful qodar...,

diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pelaksana kegiatan.⁵⁷

“Dalam setiap pelaksanaan kami mengajukan RAB kegiatan. Kemudian RAB tersebut diverifikasi oleh sekdes, setelah disahkan oleh sekdes barulah kegiatan tersebut bisa kami laksanakan”.

Gambar 4. Contoh RAB kegiatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.

PEMERINTAH DESA MARGA AYU PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017							
1	2	3	4	5	6	7	8
Bidang	: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Kegiatan	: Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa						
Waktu Pelaksanaan	: 12 Bulan						
Sumber Dana	: ADD						
Output/Keluaran	: Lancarnya kegiatan pengelolaan keuangan desa						
ODE	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA			18.000.000,00			18.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>			18.000.000,00			18.000.000,00
	Honorarium PKPKD dan PTPKD Pengelola Keuangan			18.000.000,00			18.000.000,00
1.1.04							
	01. Honor PKPKD	ADD	12 Bulan	700.000,00	12 Bulan	700.000,00	8.400.000,00
	02. Honor Koordinator PTPKD	ADD	12 Bulan	400.000,00	12 Bulan	400.000,00	4.800.000,00
	03. Honor Bendahara	ADD	12 Bulan	400.000,00	12 Bulan	400.000,00	4.800.000,00
	JUMLAH (Rp)			18.000.000,00			18.000.000,00
		Telah Diverifikasi sekdes			21 January 2018 Pelaksana Kegiatan,		
		AMINUDIN, ST			ALJ NURBIDIK		

Sumber: LPJ ADD desa Marga Ayu Tahun 2017

Setelah kegiatan dilaksanakan maka selanjutnya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada kepala desa melalui sekdes. Pengajuan SPP didukung dengan surat tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.

Gambar 5. Contoh Surat pernyataan tanggungjawab belanja

⁵⁷ Ibid...,

PEMERINTAH DESA MARGA AYU
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Bidang	: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Kegiatan	: Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Fatchuroji Dkk. 00058/KWT/01.13/2017		Pembayaran Honor PKPKD bulan Januari-Mei 2017	3.500.000,00
2	Fatchuroji Dkk. 00059/KWT/01.13/2017		Pembayaran Honor PKPKD, PTPKD, dan Bendahara Bulan Juni 2017	1.500.000,00
Total				5.000.000,00

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

MARGA AYU, 21 June 2017
Pelaksana Kegiatan,

ALI NURSIDIK

Sumber: LPJ ADD desa Marga Ayu Tahun 2017.

Gambar 5 merupakan surat pernyataan tanggungjawab belanja yang dijadikan dokumen untuk melakukan pembayaran pelaksanaan kegiatan. Surat keterangan permintaan pembayaran yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Contoh surat permintaan pembayaran yang telah diverifikasi sekdes

PEMERINTAH DESA MARGA AYU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor : 0008/SP/01.13/2017


1. Bidang	: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Kegiatan	: Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa
3. Waktu Pelaksanaan	: 12 Bulan

Rincian Pendaftar :


No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
			4	5	6	7	8
1	2						
1	5.11.04	Honorarium PKPKD dan PTPKD Pengelola Keuangan	18.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	13.000.000,00
		Jumlah	18.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	13.000.000,00

MARGA AYU, 21 June 2017

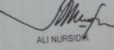
Telah Dibayar Lunas
Bendahara Desa


ATIKA MULIYA

Telah Diverifikasi,
sekdes


AMINUDIN, ST

Pelaksana Kegiatan,


ALI NURSIDIK

Sumber: LPJ ADD desa Marga Ayu Tahun 2017.

Setelah itu dokumen tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Kemudian bendahara desa melakukan pembayaran. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan sekretaris desa:⁵⁸

“SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan saya verifikasi dan setelah berkas dinyatakan lengkap, maka kepala desa menyetujui dan setelah itu bendahara desa melakukan pembayaran”.

Gambar 7. Contoh kwitansi pembayaran

Telah diverifikasi oleh PTPKD <i>Aminudin ST</i> Aminudin ST Pengelola Barang Desa,	NO : 1 KWITANSI form 7
Telah Teima Dari : BENDAHARA DESA MARGA AYU	
Uang Sejumlah : Tiga juta lima ratus ribu rupiah	
Untuk Pembayaran : Pengelola Keuangan Desa Bulan Januari-Mei	
: PENGELOLA KEUANGAN DESA	
Desa Marga Ayu Kec. Margasari	
Kab. Tegal Alokasi Dana Desa Tahun 2017	
	Marga Ayu, 21 Juni 2017 Yang berhak menerima
Terbilang : Rp 3.500.000,00	MATERAI TEMPIL 6000 Shureji Dik

Sumber: LPJ ADD desa Marga Ayu tahun 2017

Perbup Tegal Nomor 02 tahun 2017 mengatur tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut: ADD dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Intensif Rukun Tetangga

⁵⁸ Wawancara dengan Sekdes Marga Ayu, Bapak Aminudin ST...,

(RT) dan Rukun Warga (RW), bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta bidang kemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan ADD secara umum dapat dilihat dalam tabel 13.

Tabel 13. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD tahun 2017

NO	Program	Anggaran	Realisasi	Silpa
1	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	Rp. 255.048.000,-	Rp. 182.693.000,-	Rp. 72.355.000,-
2	Tunjangan BPD	Rp. 10.200.000,-	Rp. 7.800.000,-	Rp. 2.400.000,-
3	Operasional kantor desa	Rp. 38.881.131,-	Rp. 38.801.500,-	Rp. 79.631,-
4	Honor pengelolaan keuangan desa	Rp. 18.000.000,-	Rp. 14.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
5	Operasional BPD	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	-
6	Operasional RT / RW	Rp. 23.560.000,-	Rp. 23.560.000,-	-
7	Kegiatan pendataan dan pengisian data desa	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.500.000,-	-
8	Musyawarah desa	Rp. 8.148.000,-	Rp. 8.148.000,-	-
9	Kegiatan BOP Raskin	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.500.000,-	-
10	Penyelenggaraan LINMAS	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	-
11	Operasional LPMD	Rp. 9.460.500,-	Rp. 9.460.500,-	-
12	Operasional PKK	Rp. 10.975.000,-	Rp. 10.975.000,-	-
13	Operasional Karang Taruna	Rp. 5.780.000,-	Rp. 5.780.000,-	-
14	Kegiatan Pelatihan SISKEUDES	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	-
15	Kegiatan pelatihan ukur tanah	Rp. 4.500.000,-		-
16	Kegiatan operasional peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat	Rp. 18.180.000,-		-
	JUMLAH	Rp. 425.232.631,-	Rp. 346.398.000,-	Rp. 78.834.631

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan ADD desa Marga Ayu Tahun 2017

Pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai ADD pada tahun 2017 baru dapat terlaksana pembayarannya dibulan Juni 2017. Hal tersebut terjadi karena pencairan dana tahap 1 baru terjadi pada tanggal 20 Juni 2017. Sebab tertundanya pencairan dana tahap 1 adalah karena APBDes baru ditetapkan pada tanggal 06 Juni 2017. Hal itu membuat pelaksanaan pembayaran baru teralisasi di bulan Juni. Sebagai contoh disajikan gambar dokumen yang dapat dilihat pada gambar 8

Gambar 8. Contoh SPP yang dibayarkan pada bulan Juni 2017

PEMERINTAH DESA MARGA AYU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 Kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Alokasi Pendanaan :

Nomor : 0013/SPP/01.13/2017

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.1.2.39.	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	3.500.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
		Jumlah	3.500.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

MARGA AYU, 21 Juni 2017

Sesuai Untuk Dibayarkan

KEPALA DESA MARGA AYU

ATIKHA EMILIA

Telah Dibayar Lunas

Bendahara Desa

AMNUDDIN ST

Telah Diverifikasi

seksi

ALI NURSIDI

PELAKSANA KEGIATAN

Sumber: LPJ ADD desa Marga Ayu tahun 2017.

Dari gambar 8 tersebut dapat dilihat bahwa pembayaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dibayarkan pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh

ratus lima puluh ribu rupiah). pembayaran tersebut merupakan pembayaran tahap pertama. Pagu anggaran untuk kegiatan tersebut selama satu anggaran adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dari uraian diatas Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembayaran akan terlambat manakala pencairan dana dari pemerintah daerah atau kabupaten mengalami keterlambatan seperti yang dialami oleh pemerintah desa Marga Ayu.

Untuk menganalisis tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam ADD desa Marga Ayu tahun 2017 peneliti menggunakan indikator sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun analisis tahap pelaksanaan pengelolaan ADD desa Marga Ayu tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel 14.

Tabel 14. Analisis Indikator Kesesuaian Pelaksanaan ADD desa Marga Ayu tahun 2017 menurut Permendagri No.113 Tahun 2014

No	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak sesuai)
1	Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa	semua pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Seperti ADD yang merupakan pendapatan transfer masuk melalui rekening desa. Desa memiliki satu rekening sebagai penyimpan dana tunggal yang dimiliki desa	S
2	Pelaksana	Setiap pelaksanaan	S

	kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa	kegiatan mengajukan RAB kegiatan. Kemudian RAB tersebut diverifikasi oleh sekdes, setelah disahkan oleh sekdes barulah kegiatan tersebut bisa dilaksanakan	
3	Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan	Pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas segala tindakan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD	S
4	Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran	SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan diverifikasi sekdes dan setelah berkas dinyatakan lengkap, maka kepala desa menyetujui dan setelah itu bendahara desa melakukan pembayaran	S

Sumber: Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan program kegiatan desa Marga Ayu tahun 2017 yang dibiayai oleh ADD secara prosedur terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi dalam pembayaran pelaksanaan kegiatan terjadi keterlambatan karena pencairan dana tahap 1 baru teralisasi bulan Juni tahun 2017.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi yang terjadi.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. Saat ini penatusahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama sistim keuangan desa (siskeudes). Siskeudes dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Hal tersebut sesuai dengan keterangan bendahara desa Marga Ayu:⁵⁹

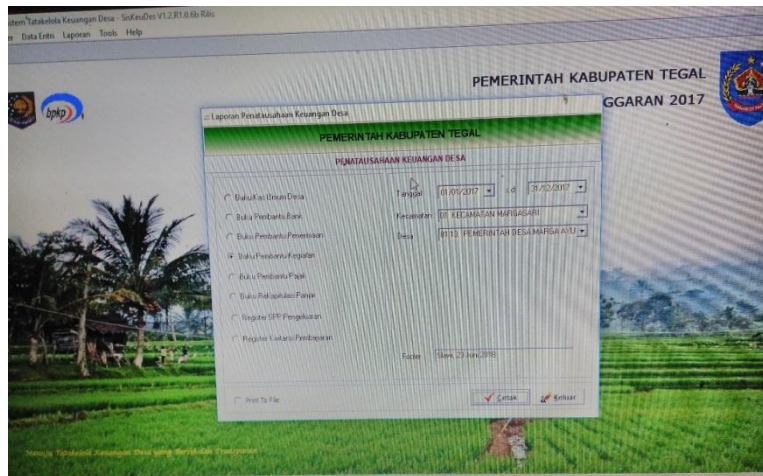
“Segala bentuk pemasukan dan pengeluaran tercatat dan harus melalui rekening desa meskipun nanti dana tersebut dipakai lagi, contohnya ada saat pemasukan hasil dar sewa tanah kas desa, desa mendapatkan pemasukan dan dana tersebut harus masuk dalam rekening desa, meskipun nantinya dana itu dipakai lagi. Setiap satu bulan sekali saya melaporkan keuangan kepada kepala desa”.

⁵⁹ Wawancara dengan bendahara desa Marga Ayu, Atika Emilia S.Pd...,

Dalam penatausahaan keuangan khususnya ADD pemerintah kabupaten Tegal menerapkan aplikasi sistem keuangan yang bernama siskeudes (sistem keuangan desa) yang digunakan untuk membantu tugas bendahara desa dalam mengelola keuangan desa. Hal tersebut diterangkan oleh sekdes Marga Ayu:⁶⁰

“Kabupaten Tegal pada tahun 2017 mulai menerapkan aplikasi siskeudes secara umum untuk membantu pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut tentunya mempermudah tugas bendahara karena sudah menggunakan dukungan teknologi. Siskudes sendiri merupakan pilot projek di Jawa Tengah karena pemda Tegal berusaha keras untuk mewujudkannya dan terealisasi. Untuk sementara siskudes hanya bisa diakses oleh bendahara desa. Kedepan nantinya semua orang dapat mengakses siskudes”.

Gambar 9. Tampilan siskeudes



Sumber: Foto tampilan siskeudes pemerintah desa Marga Ayu

⁶⁰ Wawancara dengan Sekdes Marga Ayu, Bapak Aminudin ST...,

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa setelah pelaksanaan kegiatan telah selesai dan pembayaran telah dilakukan oleh bendahara desa. Secara teknis bendahara desa melakukan input otomatis dalam aplikasi siskeudes. Penatusahaan oleh bendahara desa Marga Ayu baru terjadi setelah dana tahap pertama cair yaitu pada bulan Juni dan yang mengerjakan adalah bendahara desa yang baru.

Sebagai contoh penerimaan atau pencairan ADD tahap pertama yaitu periode Januari sapai dengan Juni 2017 masuk melalui rekening desa pada tanggal 20 Juni 2017. Untuk rekening desa sendiri menggunakan rekening dari bank milik pemda yaitu bank TGR (Tegal Gotong Royong).

Siskeudes sangat membantu bendahara desa dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Karena aplikasi ini pemerintah desa lebih mudah dalam menatausahakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan karena dengan sekali input transaksi maka dokumen-dokumen serta pelaporan yang diminta oleh berbagai regulasi yang ada dapat dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi. Aplikasi siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan bersama oleh kemendagri dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa.

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa Marga Ayu setelah pencairan, pelaksanaan kegiatan dan pembayaran selesai yaitu terjadi pada bulan Juni. Karena penatusahaan

dilakukan secara otomatis maka peneliti tidak bisa menunjukkan bukti berupa print out. Untuk melakukan penatausahaan bendahara desa membuka aplikasi siskeudes, klik menu penatausahaan maka akan keluar sub menu seperti buku kas umum desa, buku pembantu penerimaan, buku pembantu kegiatan, buku pembantu pajak, buku rekapitulasi panjar, register spp pengeluaran, dan register pembayaran. Data yang telah diinput tersimpan dalam sistem secara otomatis. Hanya bendahara beserta sekdes dan kepala desa yang dapat mengakses atau membuka aplikasi tersebut.

Tabel 15. Indikator kesesuaian Penatusahaan ADD desa Marga Ayu tahun 2017 menurut Permendagri No.113 Tahun 2014

No	Indikator	Hasil wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak sesuai)
1	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa Marga Ayu	S
2	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan	Setiap pemasukan dan pengeluaran bendahara desa menggunakan siskeudes yang secara otomatis akan membantu tugas bendahara desa dalam melakukan penatausahaan	S
3	Bendahara desa	Bendahara desa	S

	mepertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Marga Ayu setiap bulan melaporkan laporan pertanggungjawaban bulanan	
--	---	--	--

Sumber: Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 15 adalah tabel indikator yang digunakan untuk menganalisis penatausahaan pengelolaan ADD desa Marga Ayu. Tabel tersebut berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan sebelumnya, pemerintah desa Marga Ayu dapat dikatakan sudah melaksanakan penatusahaan dengan baik yaitu sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun, karena pencairan dana tahap 1 dilakukan pada bulan juni, maka bendahara desa Marga Ayu baru menginput data penatausahaan dalam aplikasi siskeudes pada bulan Juni 2017.

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun

berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.

Dalam hal ini pemerintah desa Marga Ayu menyampaikan laporan ADD kepada Bupati c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Tegal melalui camat setiap enam bulan sekali dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Laporan penggunaan ADD mencakup jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, dan laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.

Dalam proses pelaporan penggunaan ADD kepala desa dituntut tepat waktu, karena jika terlambat maka Bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Namun dalam praktiknya tidak ada pengurangan dana seperti yang dikatakan oleh bendahara desa Marga Ayu:⁶¹

“Jika terjadi keterlambatan dalam laporan keuangan, tidak ada sanksi dari pemda, hanya saja jika laporan belum lengkap ya dana tidak bisa dicairkan” .

Laporan penggunaan ADD diperoleh dari siskeudes berupa print out. Tekhnisnya bendahara mencetak laporan-laporan akan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten. Berkas-berkas laporan yang telah dicetak disusun sesuai dengan ketentuan yang ada. Laporan akhir realisasi penggunaan ADD desa Marga Ayu dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017.

⁶¹ Wawancara dengan bendahara desa Marga Ayu, Atika Emilia S.Pd...,

Laporan tersebut ditandatangani oleh bendahara desa dan kepala desa Marga Ayu dengan diketahui oleh camat Margasari.

Dalam pelaksanaannya laporan penggunaan dana dilaporkan oleh pemerintah desa kepada pemkab Tegal melalui pemerintah kecamatan Margasari. Biasanya pemerintah kecamatan mengumpulkan secara kolektif laporan keuangan dari desa-desa kemudian dilaporkan kepada pemerintah kabupaten Tegal. Terkadang juga pemerintah desa harus melaporkan sendiri kepada pemerintah kabupaten secara langsung. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bendahara desa Marga Ayu:⁶²

“Dalam teknisnya biasanya kecamatan mengumpulkan secara kolektif laporan-laporan dari desa-desa, biasanya kita juga menyerahkan laporan sendiri langsung ke kabupaten”.

Peneliti dalam menganalisis tahap pelaporan menggunakan indikator sesuai dengan Permendagri No.113 tentang pengelolaan keuangan desa. Analisis tahap pelaporan pengelolaan ADD desa Marga Ayu tahun 2017 disajikan dalam tabel 16.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dokumen-dokumen laporan penggunaan ADD pemerintah desa Marga Ayu maka dapat dikatakan pelaporan pemerintah desa Marga Ayu telah sesuai dengan permendagri No.113 tahun 2014 karena tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dilaksanakan 30 Juni

⁶² *Ibid...*,

2017 dan laporan realisasi APBDes semester akhir dilaksanakan tanggal 31 Desember 2017.

Tabel 16. Indikator kesesuaian pelaporan ADD desa Marga Ayu tahun 2017 menurut Permendagri No.113 tahun 2014

No	Indikator	Hasil wawancara/pengamatan	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak sesuai)
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota	Laporan disampaikan kepada pemerintah kabupaten Tegal baik melalui kecamatan maupun secara langsung	S
2	Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan	Laporan realisasi semester 1 dilaporkan pada bulan juni 2017	S
3	Laporan akhir tahun dilaporkan disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya	Laporan realisasi akhir tahun dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017	S

Sumber: Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota

setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ADD sebagaimana Perbup Tegal No.2 Tahun 2017 berpedoman pada peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban dan berita acara dikirim kepada Tim Kordinasi kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi.

Pertanggungjawaban ADD dibuat tersendiri dalam bentuk laporan pertanggungjawaban ADD. Sesuai dengan program-program yang dibiayai dari ADD yang telah direncanakan dalam RKPDes, laporan pertanggung jawaban ADD terdiri atas 16 (enam belas) program kegiatan. Laporan pertanggungjawaban ADD desa Marga Ayu tahun 2017 terdiri atas laporan pertanggungjawaban:

- a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- b. Tunjangan BPD
- c. Operasional kantor desa
- d. Operasional BPD
- e. Operasional RT dan RW
- f. Kegiatan pendataan data desa
- g. Musyawarah desa
- h. Pengelolaan keuangan desa
- i. Pelatihan siskeudes
- j. Penyelenggaraan LINMAS
- k. Operasional LKMD
- l. Operasional PKK
- m. Operasional Karang Taruna
- n. Pelatihan ukur tanah
- o. Operasional peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat
- p. Operasional raskin

Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bukti atas pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam mengelola ADD. Selain itu, laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mrncairkan dana pada tahun selanjutnya. Desa Marga Ayu dalam membuat laporan pertanggungjawaban didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada pemerintah kabupaten c.q kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui kecamatan.

Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara desa dan sekretaris desa Marga Ayu dengan didampingi oleh tim pendamping kecamatan. Meskipun bendahara dan sekretaris desa tergolong baru, tetapi dalam pembuatan laporan dilaksanakan sendiri tanpa menggunakan jasa pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bendahara desa Marga Ayu:⁶³

“Dalam pembuatan laporan kami kerjakan sendiri, ada desa yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat laporan. Tetapi kami berusaha untuk mengerjakan sendiri”.

Apabila masyarakat ingin mengetahui lebih detail tentang informasi pengelolaan ADD pemerintah desa Marga Ayu terbuka untuk memberikan informasi secara langsung dengan datang kantor kelurahan. Hal itu disampaikan oleh sekdes Marga Ayu:⁶⁴

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Wawancara dengan Sekdes Marga Ayu, Bapak Aminudin ST...,

“Kami membuka diri untuk masyarakat apabila ingin mengetahui secara detail informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa silahkan datang ke kantor keluarahan”.

Laporan pertanggungjawaban juga disampaikan oleh pemerintah desa Marga Ayu kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah. Hal itu dikatakan oleh ketua BPD desa Marga Ayu:⁶⁵

Pemerintah desa sudah bertanggungjawab dengan baik. Secara administratif pemerintah desa telah melaporkan kepada pemerintah kabupaten, kepada masyarakat pemerintah telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada saat musdes kemarin”.

Dalam menganalisis tahap pertanggungjawaban peneliti menggunakan indikator kesesuaian pertanggungjawaban ADD desa Marga Ayu tahun 2017. Indikator tersebut berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis dapat dilihat dalam tabel 17. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban penggunaan ADD desa Marga Ayu telah sesuai dengan permendagri No.113 tahun 2014. Pemerintah desa Marga Ayu telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban ADD kepada pemerintah kabupaten, selain itu pertanggungjawaban ADD juga telah disampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah.

⁶⁵ Wawancara dengan ketua BPD desa Marga Ayu, Wahyudi, Senin, tanggal 18 Juni 2018 Pukul 17.00 Wib di rumah beliau

Tabel 17. Indikator kesesuaian pertanggungjawaban ADD desa Marga Ayu tahun 2017 menurut Permendagri No.113 Tahun 2014

No	Indikator	Hasil wawancara/pengamatan	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak sesuai)
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	Laporan pertanggungjawaban telah disampaikan pada akhir tahun kepada pemerintah kabupaten Tegal c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	S
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	Meskipun laporan ADD terintergrasi dengan laporan APBDes, laporan pertanggungjawaban ADD juga dibuat tersendiri	S
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat	Pemerintah desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui forum musyawarah	S

Sumber: Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) desa Marga Ayu terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan, secara prosedur sudah sesuai peraturan meskipun terjadi keterlambatan pencairan dana. Dalam tahap penatusahaan dapat dikatakan sudah sesuai aturan. Tahap pelaporan dapat dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Dalam tahap Pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan. Meskipun pengelola keuangan desa Marga Ayu termasuk perangkat baru, hal tersebut secara umu tidak menjadi kendala karena pemerintah desa Marga Ayu telah melaksanakan pelatihan (sistim keuangan desa) siskeudes untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

B. Saran

1. Untuk kedepannya, pemerintah desa Marga Ayu hendaknya tidak menunda penetapan APBDes. Karena jika dilakukan penundaan, maka akan mengalami keterlambataan dalam pencairan dana transfer dari pemerintah kabupaten.
2. Pemerintah desa hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa supaya semua perangkat mempunyai pemahaman yang sama tujuannya adalah supaya membantu keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada khususnya dan keuangan desa pada umumnya.
3. Dalam penelitian selanjutnya hendaknya lebih diperluas. Karena dalam penelitian ini terbatas pada pengelola keuangan desa saja, tidak sampai pada pembina dan pengawas pengelolaan keuangan desa.

C. Penutup

Segala puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini. harapan peneliti skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Mohon maaf apabila selama

penyusunan dan penyelesaian skripsi ini peneliti membuat kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Ma'ruf. *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Sleman: Aswaja Pressindo, 2016.
- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Ainurrohma Romantis, Putri. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*, Universitas Jember, 2015.
- Ascarya. *Akad dan Poduk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Buku Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Serta Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2017.
- Darsono. et al, *Perbankan Syariah di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Dokumen APBDes Marga Ayu Tahun 2017
- Dokumen Laporan Akhir Penggunaan ADD 2017 Desa Marga Ayu
- Dokumen RKPDes Marga Ayu Tahun 2017
- Halim, Abdul dan M.Syam Kusufi. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat.

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam:Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2008.

J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Kholmi, Masiyah. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang), Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM Vol. 07 No. 02 Bulan Juli Tahun 2016

Labolo, Muhadam. *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD tahun 2017

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Medistiara, Yulida. “ICW sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa”, <https://m.detik.com/news/berita/d-3596041>, diakses pada tanggal 24 Juli 2018.

Mursal. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol.1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2015.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Perbup Tegal no 2 tahun 2017

Rosid,H.A. *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah*, dalam Yaya M. Abdul Aziz dan Ade priangani (eds.), *Titik Balik*

Demokrasi dan Otonomi Pikiran-Pikiran Krisis di Saat Krisis,
Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002.

Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar*, Jakarta : Indeks, 2012.

Subroto, Agus. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyokabupaten Temanggung Tahun 2008), Tesis Magister Sains Akuntansi, Semarang, UNDIP, 2009.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sukrawati, Kadek. Peran perangkat Desa Dalam Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi pada desa pudaria jaya kecamatan moramo), Universitas Halu Oleo, 2016.

Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Wawancara dengan Bendahara desa Marga Ayu Atika Emilia S.Pd, Sabtu 23 Juni 2018, pukul 1900 Wib

Wawancara dengan ketua BPD desa Marga Ayu, Wahyudi, Senin, tanggal 18 Juni 2018 Pukul 17.00 Wib

Wawancara dengan ketua RW 01 Bapak Syaifurroyan, Senin, tanggal 18 Juni 2018, pukul 19.00 Wib

Wawancara dengan Sekdes Marga Ayu Bapak Aminudin ST, Jum'at 23 Juni 2018, pukul 09.00 Wib

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Fatkhurozak, Senin tanggal 18 Juni 2018 Pukul 16.00 Wib

Wawancara dengan TPK kegiatan Bapak Syaiful Qoddar, Selasa, 19 Juni 2018, Pukul 16.00 Wib

Website resmi desa Marga Ayu, www.margaayu.com

Widiyanti, Arista. Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada desa sumberejo dan desa kandung di kecamatan winongan kabupaten pasuruan), UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017

Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, e-Journal ekonomi bisnis dan akuntansi, Vol.4, Universitas Jember, 2017.

www.bpkp.depkeu.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakhimkonkeudes.pdf, diakses tanggal 10 April 2018.

www.slideshare.net/mobile/agusraharjo1/pengelolaankeuangandanadesa11. Diakses pada tanggal 10 April 2018

Yuliansayah. *Akuntansi Desa*, Jakarta : Salemba Empat, 2016.

Lampiran

WAWANCARA

1. Wawancara dengan Sekdes Marga Ayu Bapak Aminudin ST, Jum'at 23 Juni 2018, pukul 09.00 Wib di balai desa Marga Ayu

Pertanyaan :

- a) Bagaimana transparansi Pengelolaan ADD?

Jawaban :

secara umum kami sebagai aparat pemerintah desa sudah transparan, hal itu kami buktikan dengan menginformasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, khususnya ADD dimana ADD ini tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Semuanya bisa di lihat melalui situs web [www. Margaayu.com](http://www.Margaayu.com) Data-data yang bisa diakses di situs desa tersebut antara lain RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya transparansi desa terhadap masyarakat. Kami juga memajang banner APBDes supaya masyarakat dapat melihat secara langsung.

Kami membuka diri untuk masyarakat apabila ingin mengetahui secara detail informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa silahkan datang ke kantor keluarahan.

- b) Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan ADD?

Jawaban :

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami melaksanakan program yang telah direncanakan dan sesuai prosedur kami telah melaporkan segala bentuk kegiatan dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah desa.

- c) Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan ADD?

Jawaban :

Secara umum partisipasi masyarakat dalam musdes dapat dikatakan baik. Sebagai gambaran dari undangan 60 (enam puluh) orang, yang hadir mencapai 40 (empat puluh) orang.

Artinya bisa dikatakan mencapai 80% (delapan puluh persen) kehadiran.

- d) Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa?

Jawaban :

Perencanaan penggunaan dana ADD dimulai dengan musrenbangdes, setelah itu dibentuk tim penyusun RKPDes. Tim kemudian melaporkan hasil RKPDes kepada kepala desa, kemudian ditetapkan dalam musdes. Setelah itu hasil dari RKPDes dijadikan acuan untuk menyusun APBDes. Pada saat Musrenbang Desa, kan dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan kecamatan, kepala desa memimpin musrenbangdes, disitu disampaikan RPJMDes dan aspirasi dari masyarakat kamiampung.

Kami tidak akan berani menggunakan dana ADD untuk program kegiatan yang tidak kami rencanakan dan tidak ada dalam RKPDes. Karena itu akan menyalahi aturan. Penetapan APBDes tahun 2017 memang tidak tepat waktu. hal tersebut terjadi karena ada beberapa permasalahan, pertama penetapan jumlah DD 2017 dari pusat tidak diakhir tahun 2016, tetapi pada bulan april 2017. Selain itu tahun 2017 kan pengelolaan keuangan menggunakan siskeudes, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sekarang melalui siskeudes mas. SDM perangkat desa sebelumnya mohon maaf kurang menguasai teknologi, maka proses pengelolaan keuangan termasuk perencanaan tertunda mas. Ada satu hal lagi, pada waktu itu ada hajat pendaftaran perangkat baru, karena hal tersebut desa mengambil keputusan APBDes ditetapkan saat perangkat baru sudah dilantik”.

- e) Bagaimana pelaksanaan penggunaan ADD?

Jawaban :

SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan saya verifikasi dan setelah berkas dinyatakan lengkap, maka kepala desa menyetujui dan setelah itu bendahara desa melakukan pembayaran

- f) Bagaimana penatausahaan dan pelaporan penggunaan ADD?

Jawaban :

Kabupaten Tegal pada tahun 2017 mulai menerapkan aplikasi siskeudes secara online untuk membantu pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut tentunya mempermudah tugas bendahara karena sudah menggunakan dukungan teknologi. Siskeudes sendiri merupakan pilot proyek di Jawa Tengah karena pemda Tegal berusaha keras untuk mewujudkannya dan terealisasi. Untuk sementara siskeudes hanya bisa diakses oleh bendahara desa. Kedepan nantinya semua orang dapat mengakses siskeudes

2. Wawancara dengan Bendahara desa Marga Ayu Atika Emilia S.Pd, Sabtu 23 Juni 2018, pukul 1900 Wib di rumah beliau.

Pertanyaan :

- a) Bagaimana transparansi Pengelolaan ADD?

Jawaban :

kami telah berupaya semaksimal mungkin transparan dalam mengelola keuangan desa, hal itu kami lakukan dengan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengakses web desa kami

- b) Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan ADD?

Jawaban :

Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kami pastikan sudah sesuai dengan prosedur. Karena jika tidak sesuai prosedur maka dana tidak dapat dicairkan. Laporan pertanggungjawaban ini sendiri harus disampaikan melalui camat. Setelah berkas dikatan lengkap, oleh camat dibuatkan surat pengantar untuk mencairkan dana.

- c) Bagaimana pelaksanaan penggunaan ADD?

Jawaban :

Semua pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Seperti ADD yang merupakan pendapatan transfer masuk melalui

rekening desa. Desa memiliki satu rekening sebagai penyimpanan dana tunggal yang dimiliki desa.

d) Bagaimana teknis penatausahaan ADD?

Jawaban :

Segala bentuk pemasukan dan pengeluaran tercatat dan harus melalui rekening desa meskipun nanti dana tersebut dipakai lagi, contohnya ada saat pemasukan hasil dari sewa tanah kas desa, desa mendapatkan pemasukan dan dana tersebut harus masuk dalam rekening desa, meskipun nantinya dana itu dipakai lagi. Setiap satu bulan sekali saya melaporkan keuangan kepada kepala desa.

semua kegiatan yang menggunakan ADD harus disertai dengan bukti-bukti penunjang seperti nota, kwitansi, daftar hadir dan foto-foto kegiatan untuk dijadikan bukti dan pembuatan SPJ kegiatan. Hal tersebut dilakukan supaya tertib administrasi.

Dalam penatausahaan kami sangat terbantu dengan adanya sistem keuangan desa (siskeudes). Dengan sistem tersebut penatusahaan lebih praktis dangan sangat mudah.

e) Bagaimana teknis pelaporan ADD

Jawaban :

Jika terjadi keterlambatan dalam laporan keuangan, tidak ada sanksi dari pemda, hanya saja jika laporan belum lengkap ya dana tidak bisa dicairkan. Dalam teknisnya biasanya kecamatan mengumpulkan secara kolektif laporan-laporan dari desa-desa, biasanya kita juga menyerahkan laporan sendiri langsung ke kabupaten.

Dalam pembuatan laporan kami kerjakan sendiri, ada desa yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat laporan. Tetapi kami berusaha untuk mengerjakan sendiri

3. Wawancara dengan ketua BPD desa Marga Ayu, Wahyudi, Senin, tanggal 18 Juni 2018 Pukul 17.00 Wib di rumah beliau.

Pertanyaan :

- a) Bagaimana kewenangan BPD dalam pengelolaan ADD?

Jawaban :

BPD dalam hal ini ikut menentukan prioritas program dan sebagai pengawas penggunaan dana ADD

- b) Bagaimana transparansi pemerintahan desa menurut bapak?

Jawaban :

Menurut saya pemerintah desa sudah bagus dalam hal transparansinya, pemerintah desa terbuka kepada semua pihak yang ingin mengetahui penggunaan dana ADD. Dengan segala sesuatunya dimusyawarahkan menunjukkan bahwa pemerintah desa bersikap transparan.

- c) Apakah pemerintah desa sudah baik dalam mengelola ADD?

Jawaban :

Pemerintah desa sudah bertanggungjawab dengan baik. Secara administratif pemerintah desa telah melaporkan kepada pemerintah kabupaten, kepada masyarakat pemerintah telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada saat musdes kemarin

- d) Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan ADD?

Jawaban :

Menurut saya partisipasi masyarakat desa biasa saja, standar lah. Dapat dikatakan baik juga. Kebanyakan masyarakat kurang paham mengenai aturan pengelolaan ADD ini.

4. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Fatkhurozak, Senin tanggal 18 Juni 2018 Pukul 16.00 Wib di rumah beliau

Pertanyaan :

- a) Bagaimana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD?

Jawaban :

Pemerintah desa sekarang lebih terbuka kepada masyarakat dan bisa dikatakan transparan, saya menilai pemerintah desa sekarang sudah bagus dalam hal transparansinya, meskipun ada beberapa kekurangan. Wajar karena perangkatnya mungkin baru.

- b) Apakah bapak terlibat dalam pengelolaan ADD?

Jawaban :

saya sebagai masyarakat mengetahui desa mempunyai sumber pendapatan yang namanya ADD, dalam perencanaannya biasanya kami diundang untuk mengikuti musrenbangdes. Pemerintah desa selalu memberikan undangan jika ada kegiatan

- c) Menurut bapak, apakah pertanggungjawaban pemerintah desa sudah baik?

Jawaban :

Menurut saya pertanggungjawaban pemerintah desa sudah baik, desa berani menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada saat musrenbangdes kemarin

- d) Menurut bapak, apakah pemerintah desa sudah baik dalam mengelola ADD?

Jawaban :

Sudah baguslah, karena sudah sesuai dengan program-program yang telah direncanakan.

5. Wawancara dengan ketua RW 01 Bapak Syaifurroyan, Senin tanggal 18 Juni 2018, pukul 19.00 Wib di rumah beliau.

Pertanyaan :

- a) Bagaimana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD?

Jawaban :

Menurut saya desa sudah transparan dalam mengelola ADD, tetapi ada beberapa hal yang masih kurang, seperti desa tidak menyampaikan realisasi penggunaannya, hanya disampaikan yang global saja.

- b) Menurut bapak, apakah pemerintah desa sudah baik dalam mengelola ADD?

Jawaban :

Menurut saya secara umum sudah baik, sudah sesuai aturan. Contohnya saja dalam perencanaan sebelum mengikuti musrenbangdes, saya berkoordinasi dengan ketua RT yang masuk dalam RW saya untuk mendata dan membawa usulan dari masyarakat, tentunya usulan tersebut kami dapatkan dengan turun secara langsung. Dari usulan tersebut kami sampaikan kepada forum untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa untuk menentukan kebijakan. Dalam hal ini pemerintah desa sangat mengakomodir kepentingan masyarakat desa

6. Wawancara dengan TPK kegiatan Syaiful Qoddar, Selasa, 19 Juni 2018, Pukul 16.00 Wib di rumah beliau.

Pertanyaan :

- a) Bagaimana gambaran secara umum pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ADD?

Jawaban :

Selama saya menjadi tim pelaksana sebenarnya saya belum menguasai teknis pelaksanaan ADD. Semua pelaksanaan kegiatan telah tercover oleh sekdes, bendahara desa. Karena saya termasuk baru dan masih belajar. Tapi saya percaya dengan kemampuan tim dalam mengelola ADD.

Untuk pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ADD ada Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. tujuannya untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD. Tim Pelaksana Kegiatan wajib melaporkan kepada Kepala Desa.

- b) Bagaimana prosedur pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ADD?

Jawaban :

Kita menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Yang jelas dalam pembuatan RAB yang berkaitan dengan pembelian kita tidak boleh melebihi standar harga kabupaten. Kita bahas berapa anggaran yang digunakan untuk pembangunan. Misalnya pembangunan jalan lingkar Timur desa memerlukan berapa anggaran

Setelah RAB disetujui barulah kegiatan kita eksekusi dan pencairan dilaksanakan setelah kegiatan selesai berikut laporan-laporannya.

- c) Bagaimana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD?

Jawaban :

Menurut saya sudah transparan ya, kami sebagai aparat desa sudah membuka diri kepada masyarakat, menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan ADD. Informasi tentang ADD dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mengetahui penggunaan ADD.

Lampiran Foto

1. Wawancara dengan sekdes Marga Ayu	2. Wawancara dengan ketua BPD Marga Ayu
 A photograph showing a man in a light blue shirt sitting at a wooden table, facing a man in a black batik shirt and a black cap. The man in the cap is gesturing with his right hand. A young boy in an orange shirt is sitting behind the man in the cap. On the table, there is a red box, a calculator, and some papers.	 A photograph showing two men sitting on a concrete ledge outdoors. The man on the left is wearing a maroon shirt and dark pants, and is holding a piece of paper. The man on the right is wearing an orange polo shirt and shorts, and is gesturing with his right hand.
3. Wawancara dengan bendahara desa Marga Ayu	4. Wawancara dengan TPK desa Marga Ayu
 A photograph showing a man in a grey shirt sitting at a table, facing a woman wearing a blue and black striped hijab. They are both looking at a laptop on the table. There are papers and a black bag on the table. The background shows a wall with a patterned curtain.	 A photograph showing two men sitting on a red sofa. The man on the left is wearing a dark purple shirt and glasses, and is holding a piece of paper. The man on the right is wearing a maroon shirt and is gesturing with his right hand. In front of them is a glass coffee table with a vase of pink flowers, a yellow container, and some snacks.

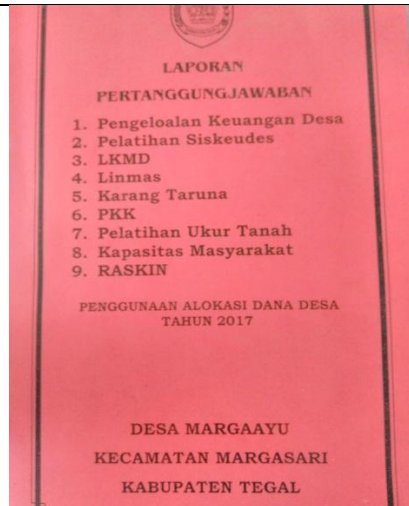
5. Wawancara dengan tokoh desa Marga Ayu



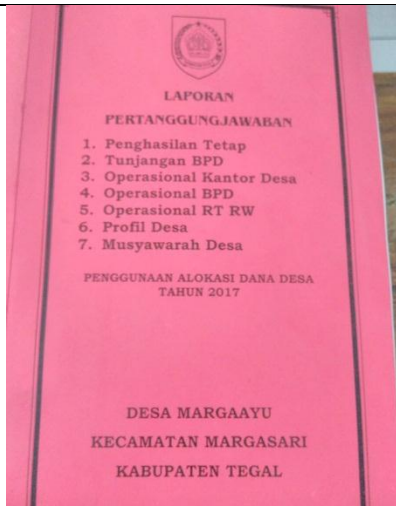
6. Wawancara dengan ketua RW 01 Marga Ayu



7. Foto LPJ 1



8. Foto LPJ 2



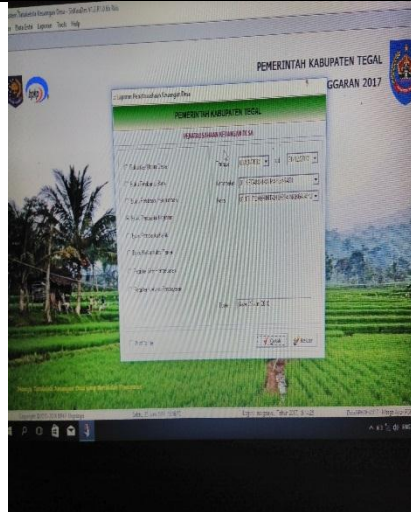
9. APBDes Marga Ayu

No. Urut	Nama	Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

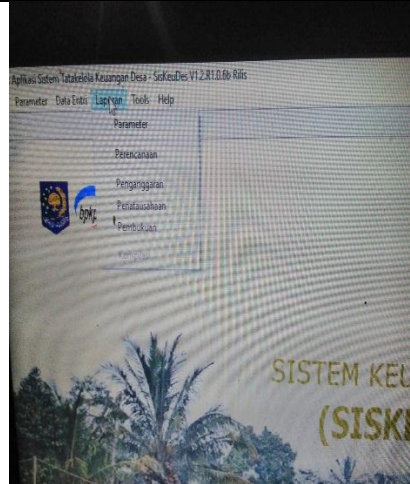
10. Foto dengan sekdes dan kasi pemerintahan



11. Tampilan siskeudes



12. Tampilan siskeudes



LAMPIRAN SK PELANTIKAN PERANGKAT DESA MARGA AYU

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Marga Ayu
Nomor : 05 TAHUN 2017
Tanggal : 16 Mei 2017

DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA YANG DIANGKAT DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA MARGA AYU, KECAMATAN MARAGASARI, KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENGHASILAN
1	2	3	4	5
1.	AMINUDIN	Demak, 10 Juni 1982	Sekretaris Desa	- Penghasilan Tetap (SILTAP); - Tunjangan; dan - Penerimaan lain yang sah.
2.	ALI NURSIDIK	Tegal, 29 April 1979	Kasi Pemerintahan	
3.	MUHAMAD IKROMULLOH	Tegal, 11 Januari 1993	Kasi Pelayanan	
4.	SYAIFUL QODAR	Tegal, 03 Juni 1979	Kasi Kesejahteraan	
5.	ATIKA EMILIA	Tegal, 26 November 1990	Kaur Keuangan	
6.	JAMAL KHOLIL	Tegal, 07 Mei 1981	Kaur Tata Usaha Dan Umum	



KEPALA DESA MARGA AYU,

FATCHUROJI

Susunan organisasi pemerintah desa Marga Ayu





BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta penetapan Lokasi dan Alokasi Dana desa Kabupaten Tegal Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata cara Pengalokasian dan pelaksanaan serta penetapan Lokasi dan alokasi Dana desa Kabupaten Tegal Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

BAB II BESARAN, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.120.521.520.000,- (Seratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 3

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Sasaran ADD adalah :

- a. sasaran lokasi ADD adalah seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Tegal.
- b. sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 6

Prinsip ADD adalah :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa ada pembedaan.
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas denganmelibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- e. pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III PENGORGANISASIAN Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 7

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - d. Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Wakil Pengarah;
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - f. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - g. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - h. Anggota terdiri dari :
 1. Inspektur Kabupaten Tegal
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kab. Tegal;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Tegal;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal;
 5. Kepala Bidang Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 9. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah;
 10. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kab. Tegal;
 11. Kepala Bidang pada BPKAD Kab. Tegal

BAB VI
PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 18

- (1) ADD dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, bidang Pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. bagi Desa yang besaran ADD berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- digunakan paling banyak 60% dari 30% Belanja APBDesa untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, termasuk didalamnya premi kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
 - b. bagi Desa yang besaran ADD berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 700.000.000,- digunakan antara Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak 50% dari 30% Belanja APBDesa untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, termasuk didalamnya premi kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
 - c. perhitungan 30% Belanja APBDesa sebagaimana dimaksud huruf a dan b dituar atau setelah dikurangi Belanja APBDesa yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
 - d. paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari 30% belanja APBDesa digunakan untuk operasional pemerintahan desa;
 - e. paling sedikit 10% (Sepuluh per seratus) dari 30% belanja APBDesa digunakan untuk honorarium BPD;
 - f. paling banyak 13,5% (Tiga belas koma lima per seratus) dari 30% belanja APBDesa digunakan untuk insentif RT dan RW;
 - h. sisa Prosentase dari perhitungan pada huruf a,b,c,d dan e digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang merupakan kewenangan desa.
- (3) Pengalokasian batas minimal dan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 19

Pengaturan lebih lanjut tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Kepala desa dan Perangkat Desa) yang meliputi penghasilan Tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 20

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain untuk :
 1. pengelolaan keuangan desa;

LOKASI DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2017

[illegible]



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
19. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 23

- (1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyertakan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDDesa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDDesa.
- (2) Perubahan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2017

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perencanaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

A. PENDAPATAN

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.678.943.042,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta, Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Dua Rupiah) (Sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam ribu tujuh ratus tiga rupiah) yang bersumber dari :

I Pendapatan Desa :		
a. Pendapatan Asli Desa	:	Rp. 81.000.000,00
b. Pendapatan Transfer		
- Dana Desa	:	Rp. 823.217.854,00
- Bagi Hasil Daerah	:	Rp. 71.264.800,00
- Alokasi Dana Desa (ADD)	:	Rp. 425.232.631,00
c. Bantuan Keuangan	:	
- Bantuan Provinsi untuk RTLH	:	Rp. 20.000.000,00
- Bantuan Provinsi untuk KPMD		Rp. 5.000.000,00
- Bantuan Kabupaten untuk PDPM		Rp. 70.000.000,00
- Bantuan Ketahanan Masyarakat		Rp. 30.000.000,00
d. Pendapatan Lain-Lain	:	
- Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya	:	Rp. 153.277.757,00
Jumlah Pendapatan	:	Rp. 1.678.943.042,00

B. BELANJA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a. Belanja		
1). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp. 554.052.491,00
2). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	:	Rp. 533.765.294,00
3). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 36.215.500,00
4). Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp. 550.680.000,00
Jumlah Belanja	:	Rp. 1.674.713.285,00

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih kurangnya kepedulian sebagian masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
2. Masih terbatasnya kemampuan aparat desa dalam mengelola keuangan desa.

Penyelesaian :

1. Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat
2. Konsultasi dinas terkait .

C. PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

- | | |
|---|--------------------|
| 1). Silpa | : Rp. - |
| 2). Pencairan Dana Cadangan | : Rp. 4.229.757,00 |
| 3). Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan | : Rp. - |

Pengeluaran Pembiayaan

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1). Pembentukan Dana Cadangan | : Rp. 4.229.757,00 |
| 2). Penyertaan Modal Desa | : Rp. |

BAB III

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Dalam penyusunan RKP-Desa Tahun 2017 prioritas program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

A. PAGU INDIKATIF DESA

Program dan kegiatan yang didanai oleh pagu indikatif desa adalah :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat.
 - b. Operasional Kantor.
 - c. Operasional BPD.
 - d. Operasional RT/RT.
 - e. Pendataan Desa.
 - f. Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - g. Operasional Penderasan PBB
 - h. Pengukuhan dan Perekrutan Perangkat Desa
 - i. Musyawarah Desa
 - j. BOP Raskin
 - k. Rehab Pendopo
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 1. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa
 - a. Pembuatan Jalan Baru
 - b. Pembuatan Drainase
 - c. Pemasangan MSO (Mitrinet Software Online)
 2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa
 - a. Pembangunan Jamban Sehat.
 - b. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni untuk Warga Kurang Mampu
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pelatihan Ukur Tanah.
 - b. Pelatihan Siskeudes
 - c. Penyertaan Modal BUMDes

B. PENDAPATAN ASLI DESA

Program dan kegiatan yang didanai oleh pendapatan asli desa adalah untuk tunjangan petugas kebersihan, dan tunjangan guru ngaji dan madrasah serta tambahan penghasilan kades dan perangkat desa Lainnya, guna meningkatkan kesejahteraan perangkat Pemerintahan Desa agar tercipta kerja pelayana prima.

C. BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Program dan kegiatan yang didanai oleh bantuan keuangan provinsi adalah untuk kegiatan pembangunan jamban sehat di rumah warga khususnya di dukuh Kalipasis I Desa Marga Ayu, bantuan untuk rumah tidak layak huni serta pemasangan MSO (Mitrinet Software Online) di Kantor BUMDes “Bangun Artha Sejahtera” guna meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat dan tersistem.

D. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dibiayai oleh pagu indikatif desa
 - a. Keberhasilan
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat.
 - b. Operasional Kantor.
 - c. Operasional BPD.
 - d. Operasional RT/RT.
 - e. Pendataan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Kegiatan Pembangunan Talud Rt 02/01 (Jln.H.Muhidin)
 - b. Kegiatan Pengerasan Jalan H. Muhidin
 - c. Pavingisasi Gang H. Sukwi Rt 05/01
 - d. Pembangunan Pavingisasi Gang Kuri Rt 02/01
 - e. Kegiatan Pengerasan Jln Rt 02/01 (Jln. Menah)
 - f. Kegiatan Pengerasan Jln Rt 05/01 (Jln.Gendek)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN MARGASARI
DESA MARGA AYU

Alamat : Jl. H. Usmar Nomor : 003 Marga Ayu Margasari Kode Pos 52465

SURAT IZIN RISET

Nomor : 075/DS-13/04/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Desa : Marga Ayu
Kecamatan : Margasari
Kabupaten : Tegal

Memberikan izin kepada :

Nama : **ABU MASTHAD**
NIM/Program/Smt : 1805026121/S.1/IX
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Desa Marga Ayu, Rt.03/01, Kec. Margasari, Kab. Tegal
Keperluan izin : Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Ekonomi
Islam Program S.1 dengan Judul : IMPLEMENTASI ASA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM ALOKASI DANA DESA
(ADD) DESA MARGA AYU KECAMATAN MARGASARI
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017

Demikian surat keterangan izin riset ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Marga Ayu

HATMURJO



PEMERINTAHAN KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN MARGASARI

Jl. Raya Pakulnui Telp. (0283) 3456024 Margasari, Kode Pos 52463

Margasari, 19 April 2018

Nomer	: Qh 2 / 41 / 404-2018	Kepada Yth:
Lamp	: 1 (Satu) Berkas	Kepala BPRAD Kabupaten Tegal
Perihal	: Permohonan Pencairan Dana Transfer Th. 2018	Di:
		SAWI

Dengan Hormat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2018 tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi Dan Alokasi Dana Desa (DD) Tahun 2018. Bersama Ini Kami mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Desa MARGA AYU Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Sebagai Dokumen persyaratan yang merupakan satu kesatuan Pertanggungjawaban berikut kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dari Camat Margasari selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Kecamatan.
2. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Kepala Desa dan Bendahara Desa
3. Surat Keputusan Kepala Desa tentang menunjuk BANK sebagai pemegang Rekening Kas Desa.
4. APBDes Siskeudes Tahun 2018
5. Pertanggungjawaban Penggunaan ADD tahun lalu (2017)

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kebijaksanaan untuk dapat merealisasikan permohonan pencairan dana Transfer Tahun 2018.

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas berkenannya kami haturkan terimakasih

CAMAT MARGASARI

BAMBANG SILIARJO
Pembina Tk 1
NIP. 19640910 196603 1 009

Tembusan Disampaikan :
1. Kepala DISPERMADES Kab. Tegal
2. Camat Margasari
3. RPD Desa Marga Ayu
4. Arsip

LAPORAN AKHIR PENGUNJULAN ALIHAN DESA SEDA (AGU) 2017
Pemerintah Desa Marga Ayu Kecamatan Mangrove Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2017

TOTAL PENGUNJULAN : Rp. 425.332.633,-

KODE REKONSILIASI	URAIAN	MOMOR DAN TANGGAL BUKTI	Jumlah Pengeluaran (Rp)	Jumlah Pengeluaran (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1.1	Penerimaan Transfer					
1.1.1	Penerimaan Tahap 1 (Lampiran 1 AGU Juni 2017)	25-Jun-17	712.450.515		212.450.515	
1.1.2	Penerimaan Tahap 2 (Lampiran 2 AGU September 2017)	30-Sep-17	3.804.158		118.014.479	
1.1.3	Penerimaan Tahap 3 (Kebijakan AGU November 2017)	15-Nov-17	70.273.089		389.756.278	
1.1.4	Penerimaan Tahap 4 (Desember 2017)	15-Dec-17	97.264.053		425.232.633	
1.2	SELANJA					
1.2.1	Bidang Pemerintahan Desa					
1.2.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan			122.885.000	242.135.631	
1.2.1.2	Tunjangan BPJ			7.800.000	234.719.631	
1.2.1.3	Batas Operasional Sektoral			28.361.500	175.215.131	
1.2.1.4	Batas Operasional BPJ			3.105.000	183.446.131	
1.2.1.5	Batas Operasional RI-BW			23.560.000	169.878.131	
1.2.1.6	Dukungan Kegiatan Pendidikan dan Pengisian Data Desa			3.500.000	166.378.131	
1.2.1.7	Mengembangkan Desa			5.148.000	158.230.131	
1.2.1.8	Perencanaan Keuangan Desa			14.000.000	144.730.131	
1.2.1.9	Anggaran RUP Asahan			1.500.000	140.730.131	
1.2.2	Bidang Pembinaan Masyarakat					
1.2.2.1	Pengembangan Sumberdaya & Keterampilan (LUMAS)			10.000.000	130.730.131	
1.2.2.2	Operasional LUMAS			9.485.000	121.245.131	
1.2.2.3	Operasional PKK			10.975.000	110.270.131	
1.2.2.4	Operasional Karang Taruna			5.785.000	104.485.131	
1.2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
1.2.3.1	Kegiatan Penelitian Unsurdes			3.000.000	101.485.131	
1.2.3.2	Kegiatan Operasional Peningkatan Kapasitas Partisipasi Masyarakat			18.180.000	83.305.131	
1.2.3.3	Kegiatan Pelatihan Uluh Tanah			4.500.000	78.805.131	
1.2.3.4	Kegiatan Pelatihan Uluh Tanah			4.500.000	74.305.131	
1.2.3.5	Jumlah		145.332.633	145.332.633	78.805.633	Saldo Saldo Pengeluaran Keuangan Operasional
1.2.4	Jumlah				78.805.633	

Revisi Bukti Pengeluaran (Rp) beserta bukti pendukung yang diserahkan dalam laporan ini telah tercantum dalam catatan kaki sebagai tambahan yang bersifat untuk kelengkapan informasi dan keperluan pemantauan Aparat Pengawasan Fungsional.

BENDAHARA DESA MARGA AYU

ATKA EMILIA

Mengetahui,
CAMAT MARGASARI

BAMBANG SUARLO

Pembina Tk. I

NIP. 19640910 198503 1 009



**RINGKASAN APBDES PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA MARGA AYU
TAHUN ANGGARAN 2017**

Sumberdana : **ADD Alokasi Dana Desa**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.3.	Pendapatan Transfer	425.233.831,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	425.233.831,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	425.233.831,00	
2.	BELANJA		
2.1.	Belanja Desa	574.235.831,00	
2.1.1.	Belanja Pegawai	284.475.000,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.549.000,00	
2.1.3.	Belanja Modal	106.210.831,00	
	JUMLAH BELANJA	574.235.831,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(149.002.000,00)	
3.	PEMBAYARAN		
3.1.	Pemenuhan Pembayaran	165.227.757,00	
3.1.1.	Sisa Laba Pembungan Anggaran Tahun Sebelumnya	133.227.757,00	
3.2.	Pengeluaran Pembayaran	4.225.757,00	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	4.225.757,00	
	JUMLAH PEMBAYARAN	169.453.514,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERISTINGAN ANGGARAN	0,00	

Marga Ayu, 06 Juni 2017

Pejabat Desa

FATCHURROBBILILLAH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MARGA AYU
TAHUN ANGGARAN 2017**

(Rincian) : A/D/ Belanja Desa

AKSES (RUB)	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
0.	PENDAPATAN		
102	Penerimaan Transfer	425.232.831,00	
1020	Belanja Desa	425.232.831,00	
	Jumlah Pendapatan	425.232.831,00	
2.	BELANJA		
201	Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	553.187.131,00	
2010	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	265.248.000,00	Sumber ADD
20100	Belanja Pegawai	265.248.000,00	
201000	Gaji dan Tunjangan Tetap dan Pengikat Desa	255.048.000,00	
2010000	Tunjangan BPO dan Anggotanya	10.200.000,00	
20100000	Penghasilan Operasional Kantor Desa	38.881.131,00	Sumber ADD
201000000	Belanja Barang dan Jasa	11.404.500,00	
2010000000	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, Dokumen, dll)	3.987.000,00	
20100000000	Belanja Senda Pos dan Material	387.500,00	
201000000000	Belanja Jasa Kantor (Lutris, Air, Telepon, Fax/Internet, dll)	2.640.000,00	
2010000000000	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Service, Ganti)	840.000,00	
20100000000000	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Cetak, Pas)	1.280.000,00	
201000000000000	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
2010000000000000	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	
20100000000000000	Belanja Modal	27.476.631,00	
201000000000000000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (Mesin TIK)	12.250.000,00	
2010000000000000000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat-alat	1.226.631,00	
20100000000000000000	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.000.000,00	
201000000000000000000	Penghasilan Operasional (BPO)	2.500.000,00	Sumber ADD
2010000000000000000000	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
20100000000000000000000	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, Dokumen, dll)	912.000,00	
201000000000000000000000	Belanja Senda Pos dan Material	400.000,00	
2010000000000000000000000	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Cetak, Pas)	550.000,00	
20100000000000000000000000	Belanja Makanan dan Minuman	738.000,00	
201000000000000000000000000	Belanja Perjalanan Dinas	200.000,00	
2010000000000000000000000000	Penghasilan Operasional (PTTDP)	23.580.000,00	Sumber ADD
20100000000000000000000000000	Belanja Barang dan Jasa	23.580.000,00	
201000000000000000000000000000	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, Dokumen, dll)	140.500,00	
2010000000000000000000000000000	Belanja Senda Pos dan Material	100.000,00	

KODE BOK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.4.2.9	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Cetak, Pers)	120.000,00	
2.1.4.2.14	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
2.1.4.2.26	Belanja Honorif PIRANGREJA honor di	22.800.000,00	
2.1.4	Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa dan Kegiatan Pengu	3.800.000,00	Sumber A20
2.1.4.1	Belanja Pegawai	1.230.000,00	
2.1.4.1.6	Honor Kegiatan Non Perangkat	1.230.000,00	
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa	2.570.000,00	
2.1.4.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, Dokumen, dll)	60.000,00	
2.1.4.2.4	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.000.000,00	
2.1.4.2.14	Belanja Makanan dan Minuman	210.000,00	
2.1.4.2.26	Belanja Honorif Penguji (DR, dll)	1.000.000,00	
2.1.4	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2.140.000,00	Sumber A20
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
2.1.4.2.9	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Cetak, Pers)	40.000,00	
2.1.4.2.14	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.1.4.2.26	Belanja Honorarium Non Perangkat	600.000,00	
2.1.4.2.29	Belanja Pengadaan Spanduk/Banner/Selektarand/Papan I	700.000,00	
2.1.4.2.34	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	30.000,00	
2.1.13	Kegiatan Pembangunan dan atau Pemeliharaan Sarana dan	40.000.000,00	Sumber A20
2.1.13.3	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.1.13.3.43	Belanja Modal Lainnya	40.000.000,00	
2.1.14	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keuangan Desa	18.000.000,00	Sumber A20
2.1.14.1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
2.1.14.1.4	Honorarium (PDR) dan PDRU Pengelola Keuangan	18.000.000,00	
2.1.17	Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan dan Pengangkutan Perang	19.771.000,00	Sumber A20
2.1.17.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.1.17.1.6	Honor Kegiatan Non Perangkat	4.800.000,00	
2.1.17.2	Belanja Barang dan Jasa	14.971.000,00	
2.1.17.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, Dokumen, dll)	1.341.000,00	
2.1.17.2.6	Belanja Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	800.000,00	
2.1.17.2.9	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Cetak, Pers)	910.000,00	
2.1.17.2.13	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor (Maj	4.300.000,00	
2.1.17.2.14	Belanja Makanan dan Minuman	6.740.000,00	
2.1.17.2.29	Belanja Pengadaan Spanduk/Banner/Selektarand/Papan I	180.000,00	
2.1.17.2.34	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	700.000,00	
2.1.36	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya	3.800.000,00	Sumber A20
2.1.36.2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.1.36.2.39	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	3.800.000,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	89.168.000,00	
2.2.1	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastrukt	89.168.000,00	Sumber A20

NOUR ROK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.2.1.3.28	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Desa	25.158.000,00	
2.2	Belanja Pembinaan Kemasyarakatan	25.158.000,00	
2.2.1	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8.482.500,00	Sumber A/D
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.482.500,00	
2.2.1.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, Dokumen, dll)	280.500,00	
2.2.1.2.2	Belanja Benda Pos dan Materi	150.000,00	
2.2.1.2.3	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Cetak, Peh	180.000,00	
2.2.1.2.14	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	
2.2.1.2.38	Belanja Insentif RT/RW/BPD/Linmas dll	8.400.000,00	
2.2.2	Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Kontentransmisi da	10.000.000,00	Sumber A/D
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, Dokumen, dll)	100.000,00	
2.2.2.2.3	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Cetak, Peh	100.000,00	
2.2.2.2.14	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
2.2.2.2.31	Belanja Alat Listrik/Baterai/Lampu	3.100.000,00	
2.2.2.2.38	Belanja Insentif RT/RW/BPD/Linmas dll	6.300.000,00	
2.2.4	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Pembinaan	8.780.000,00	Sumber A/D
2.2.4.2	Belanja Barang dan Jasa	8.780.000,00	
2.2.4.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, Dokumen, dll)	100.000,00	
2.2.4.2.2	Belanja Benda Pos dan Materi	120.000,00	
2.2.4.2.3	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Cetak, Peh	100.000,00	
2.2.4.2.38	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	5.460.000,00	
2.2.9	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuans/PKK/Disabilitas	10.875.000,00	Sumber A/D
2.2.9.2	Belanja Barang dan Jasa	10.875.000,00	
2.2.9.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, Dokumen, dll)	520.000,00	
2.2.9.2.2	Belanja Benda Pos dan Materi	120.000,00	
2.2.9.2.3	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Cetak, Peh	420.000,00	
2.2.9.2.14	Belanja Makanan dan Minuman	1.380.000,00	
2.2.9.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	180.000,00	
2.2.9.2.38	Belanja Insentif RT/RW/BPD/Linmas dll	8.340.000,00	
2.4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	25.880.000,00	
2.4.3	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Kipa	3.000.000,00	Sumber A/D
2.4.3.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.4.3.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, Dokumen, dll)	150.000,00	
2.4.3.2.4	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	150.000,00	
2.4.3.2.5	Belanja Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	
2.4.3.2.9	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan (Cetak, Peh	90.000,00	
2.4.3.2.13	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Meja	75.000,00	
2.4.3.2.14	Belanja Makanan dan Minuman	414.000,00	
2.4.3.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tek	150.000,00	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor :B- 821/Un.10.5/D.1/PP.00.9/01/2018

05 April 2018

Lamp. :-

Hal : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :

Johan Arifin, S.Ag., MM.

Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Abu Masihad

NIM : 1605026121

Program Studi : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Implementasi Asas Pengelolaan Keuangan Dalam Alokasi Dana
Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten
Tegal Tahun 2017

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan
skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap
judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai
Pembimbing II Saudara Dr. Nuruddin, SE.MM

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An-Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik.



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Abu Masihad
Tempat/Tanggal Lahir	: Tegal, 08 Juli 1994
Alamat	: Marga Ayu, Rt. 03 Rw. 01, Margasari, Tegal
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah

A. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---|------------------|
| 1. SDN Marga Ayu | lulus tahun 2007 |
| 2. SMP Muhammadiyah Margasari | lulus tahun 2010 |
| 3. SMA Muhammadiyah Margasari | lulus tahun 2013 |
| 4. D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo
Semarang | lulus tahun 2016 |
| 5. S.1 Ekonomi Islam UIN Walisongo
Semarang | lulus tahun 2018 |

B. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Divisi Bola Voly UKM Walisongo Sport Club UIN Walisongo Semarang

2. Ketua Komunitas Beasiswa Prestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

C. Prestasi Yang Pernah Diraih

1. Juara 3 Bola Voly antar PTKIN Se-Indonesia tingkat Nasional Pionir IAIN Palu Sulawesi Tengah 2015
2. Juara 3 Bola Voly Universitas Porsimaptar Akpol tingkat Regional Jawa Bali 2015
3. Juara 1 Bola Voly IPPBMM IAIN Tulungagung antar PTKIN se-Jawa Madura 2016
4. Juara 3 Bola Voly Universitas Porsimaptar Akpol tingkat Nasional 2016
5. Juara 2 Bola Voly antar PTKIN Se- Indonesia tingkat Nasional Pionir UIN Ar-Raniry Aceh 2017
6. Juara 3 Bola Voly POM Rayon 1 Jawa Tengah 2017

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis

ABU MASIHAD
NIM. 1605026121